



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI SUMATERA BARAT (1979-2008)**

## **SKRIPSI**



**NELLA AGUSTRI  
06151091**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

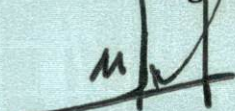
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa :

Nama : **NELLA AGUSTRI**  
No BP : 06 151 091  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat (1979-2008)**

Telah diuji dan disetujui melalui Ujian Seminar Hasil pada tanggal **07 Januari 2011** sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Disetujui oleh :  
Pembimbing Skripsi



**Drs.Masrizal, M.Soc.Sc**

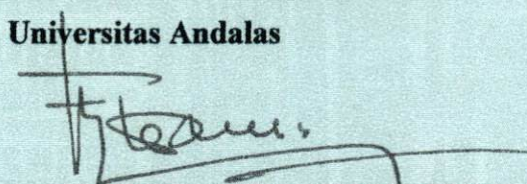
**NIP. 195802111987021003**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Andalas**

**Prof.Dr.H.Syafruddin Karimi, SE,MA**  
**NIP. 195410091980121001**

**Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
Universitas Andalas**

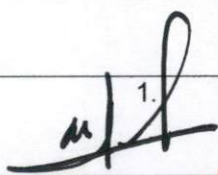
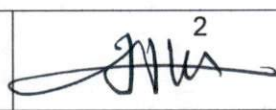
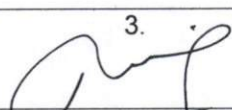


**Prof.Dr.H.Firwan Tan, SE,M.Ec.DEA.Ing**  
**NIP. 130.812.952**



	No. Alumni Universitas	<b>NELLA AGUSTRI</b>	No. Alumni Fakultas
	<b>BIODATA</b> a) Tempat/tanggal lahir : Pekan Kamis / 15 Agustus 1988 b) Nama Orang Tua : Erizon dan Deliarti c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No BP : 06151091 f) Tanggal Lulus : 07 Januari 2011 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,22 i) Lama Studi : 4 tahun 4 bulan h) Alamat Orang Tua : Jorong III Kampung, Nagari Gadut, Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam		

<p align="center"><b>Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat (1979-2008)</b></p> <p align="center">Skripsi S1 oleh: Nella Agustri    Pembimbing Skripsi: Drs.Masrizal,M.Soc.Sc</p> <p align="center"><b>Abstrak</b></p> <p>Skripsi ini membahas tentang pengaruh PDRB dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan PAD di Sumatera Barat selama periode 1979-2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penerimaan PAD dan faktor mana yang paling berpengaruh terhadap PAD Sumatera Barat antara PDRB dan jumlah kendaraan bermotor selama periode 1979-2008. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode OLS (<i>Ordinary Least Square</i>), yakni analisis regresi berganda dengan memakai metode selisih logaritma, untuk melihat bagaimana pengaruh kedua variabel tersebut terhadap penerimaan PAD di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu (<i>time series</i>) PAD, PDRB dan jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat tahun 1979-2008. Hasil penelitian menunjukkan PDRB dan jumlah kendaraan bermotor mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan PDRB dimasa yang akan datang dan melakukan identifikasi/pendataan jumlah kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD di Sumatera Barat.</p> <p>Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 07 Januari 2011</p>
---

Abstrak telah disetujui oleh :			
Tanda Tangan			
Nama Terang	Drs. Masrizal, M.Soc.Sc (Pembimbing)	Lukman, SE.M.Si (Pembahas I)	Sosmiarti, SE/M.Si (Pembahas II)

Mengetahui,		
Ketua Jurusan	<b>Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing</b>	
	<b>NIP. 130 812 952</b>	
		Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :			
		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat **ALLAH SWT**, karena dengan rahmat, karunia dan nikmat yang tak terhingga pada umat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat (19792008)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Andalas.

Skripsi ini selesai berkat dukungan, bimbingan, motivasi dan do'a dari segala pihak yang telah bersedia untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini, tanpa itu semua penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikannya. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Papa (**Erizon**) dan Mama (**Deliarti**), serta saudara tersayang (**Da Nanda, Da Arif, Nia, Putri**), terima kasih atas kasih sayang yang tulus dan doa yang tak henti-hentinya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku.
2. Bapak **Drs.Masrizal,M.Soc.Sc**, selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak **Lukman, SE.M.Si** dan Ibu **Sosmiarti, SE.M.Si**, selaku pembahas dalam seminar hasil skripsi penulis yang telah memberikan saran-saran dalam peyempurnaan penulisan skripsi.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.



5. Bapak **Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE. M.Ec, DEA, Ing**, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi.
6. Bapak **Febriandi Prima Putra, SE. Msi**, terima kasih ya pak atas keramahan dan keikhlasannya.
7. Bapak **Fajri Muharja, SE, M.Si**, selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis selama dalam masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu staf pengajar di Jurusan Ilmu Ekonomi atas didikan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Seluruh civitas akademika di jurusan Ilmu Ekonomi terutama staf Biro IlmuEkonomi ( da Jang, buk Syam, ni Nel, dan Pak Asman) yang telah membantu dan mengatur segala sesuatunya untuk keperluan perkuliahan penulis.

Penulis menyadari dan mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tapi dalam penyusunannya penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk dapat menyempurnakannya. Dengan segala kekurangannya itulah penulis mengharapkan masukan, kritikan dan saran dari semua pihak untuk dapat menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi yang penulis buat dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, untuk terutama bagi penulis sendiri.

Padang, Januari 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GRAFIK .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Batasan Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Hipotesis.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI LITERATUR	
2.1 LandasanTeori .....	11
2.1.1 Pemerintahan Daerah.....	11
2.1.2 Konsep Otonomi Daerah .....	13
2.1.3 Keuangan Daerah.....	18
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah.....	22
2.1.5 Pajak Daerah .....	25
2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	26



2.2 Studi Literatur .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	31
3.2 Variabel Penelitian .....	31
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5 Metode Analisis Data .....	33
3.5.1 Pembentukan Model .....	33
3.5.2 Pengujian Model.....	35
3.5.2.1 Uji Regresi .....	35
3.5.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH SUMATERA BARAT</b>	
4.1 Keadaan Umum Sumatera Barat .....	41
4.1.1 Letak Geografis.....	41
4.1.2 Penduduk .....	43
4.1.3 Keuangan dan Perbankan.....	46
4.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	47
4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	50
4.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku.....	51
4.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan .....	57
4.3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita .....	63
4.4 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor .....	64

## BAB V TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Temuan Empiris .....	67
5.2 Implikasi Kebijakan .....	73

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	77
6.2 Saran.....	78

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 :Pembagian Wilayah Provinsi Sumatera Barat Menurut Luas Kabupaten/Kota.....	42
Tabel 4.2 : Perkembangan Jumlah Penduduk Sumatera Barat Pada Tahun 2000- 2008 .....	44
Tabel 4.3 : Jumlah dan Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Pada Tahun 2008 di Sumatera Barat .....	46
Tabel 4.4 : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat Pada Tahun 1979-2008 (dalam ribuan).....	49
Tabel 4.5 : Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku Pada Tahun 1979-2008 (dalam jutaan).....	52
Tabel 4.6 : Distribusi Persentase dan Rata-Rata Distribusi PDRB Sumatera Barat Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004- 2008 .....	56
Tabel 4.7 : Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Pada Tahun 1979-2008 (dalam jutaan) .....	57
Tabel 4.8 : Pertumbuhan Masing-Masing Sektor Lapangan Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.....	62
Tabel 4.9 : Perkembangan PDRB Perkapita di Sumatera Barat Pada Tahun 2004- 2008 (dalam jutaan).....	64
Tabel 4.10: Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat.....	65
Tabel 5.1 : Hasil Uji Multikolinearitas.....	70
Tabel 5.2 : Hasil Uji Autokorelasi.....	72

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 : Uji Analisis Heterokedastisitas .....	71
--	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejak terjadinya krisis moneter dan transisi politik, maka tanggal 1 Januari 2001, seluruh daerah di Indonesia mulai menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah”, dan UU No. 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. UU No. 22 tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Menurut asas desentralisasi kota dan kabupaten bertindak sebagai “motor”, sedangkan pemerintah propinsi sebagai koordinator. Sedangkan UU No.25 tahun 1999 mengatur pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip “*money follows function*” (Landiyanto, 2005). Berlakunya kedua undang-undang ini akan berdampak pada perubahan paradigma pengelolaan daerah khususnya aspek keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua undang-undang ini memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang ada, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah.

Selanjutnya, ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, akan memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintahan daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan

pengaturan dan pembagian sumber daya nasional, perimbangan keuangan pusat dan daerah secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah terutama kepada pemerintahan kabupaten dan kota. Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Berti, 2006).

Secara tidak langsung, otonomi daerah berdampak pada kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki suatu daerah. Darumurti dan Rauta (dalam Berti, 2006) mengemukakan bahwa implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas, yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain, bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin bertambah pula urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan dalam rangka otonomi daerah antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana daerah.

Dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan, aspek keuangan merupakan masalah pokok pemerintah dalam rangka penerimaan dan pengeluaran demi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, meningkatnya pendapatan perkapita dan taraf hidup masyarakat, merupakan faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi masyarakat dan



pemerintah. Hal ini akan menyebabkan pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi. Di lain pihak sumber penerimaan yang terbatas harus diusahakan untuk menutupi kebutuhan tersebut (Berti, 2006).

Selain itu, aspek keuangan merupakan salah satu kriteria dasar untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho, 1998). Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh suatu daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintahan pusat.

Pada dasarnya di dalam UU No. 33 tahun 2004 dinyatakan ada empat sumber keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah lainnya serta lain-lain pendapatan yang sah..
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan yang sah (hibah dan dana darurat)

Salah satu ciri utama daerah yang dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah adalah memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya (Halim, 2001). Dengan demikian, tingkat proporsi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin mengecil. Sehingga diharapkan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah semaksimal mungkin bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah, yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah (Kuncoro, 2007). Artinya semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia sumber keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Namun kenyataannya, banyak ditemukan permasalahan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dalam Panduan Keuangan Daerah (2007) mengemukakan beberapa permasalahan keuangan daerah sebagai berikut.

1. Permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan pungutan pajak dan restribusi yang sedikit mempunyai kaitan dengan kapasitas pelayanan diberikan Pemerintah Kota/Kabupaten.
2. Mekanisme dan prosedur pungutan daerah terutama kurangnya keterpaduan fungsi yang efektif antara unit instansi yang bersangkutan.
3. Sarana dan prasarana yang kurang.
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
5. Dan hal-hal yang berkaitan dengan operasionalisasi perolehan pendapatan daerah.

Ketergantungan daerah yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat di satu sisi, dan rendahnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penerimaan keuangan daerah di sisi lainnya, membawa konsekuensi terhadap



rendahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pengeluaran daerah. Mengenai hal ini, Devas (1989) menegaskan bahwa suatu daerah dikatakan otonom apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 20% dari APBD.

Rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikasi yang nyata mengenai masih tingginya tingkat keterantungan daerah kepada pusat baik secara langsung maupun tidak langsung. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dihimpun daerah di samping disebabkan rendahnya potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah, juga disebabkan oleh kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi di daerah (Ismail, 2001). Selanjutnya, Kamaludin (1983) mengemukakan faktor-faktor yang menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut.

1. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan SDM akan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, kepemilikan Sumber Daya Alam (SDA) yang terbatas juga sebagai penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Sementara itu, situasi administrasi penerimaan provinsi Sumatera Barat, secara umum diduga tidak jauh berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah, presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil (Abdullah, 2000). Hal ini terlihat pada tahun 2008 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat hanya mampu memberikan kontribusi terhadap APBD sebesar 18,78 persen (BPS, 2008). Angka ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah Sumatera Barat masih rendah.

Ada dua faktor yang diduga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat. Faktor pertama adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat tingkat perekonomian suatu daerah tertentu. Santosa (2005) mengungkapkan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya, hal ini akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Faktor Kedua yaitu jumlah kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari pajak daerah. Sehingga pada akhirnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat. Kuncoro (2004)

menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pajak utama pemerintah provinsi, yang dapat dipandang sebagai variasi pajak kekayaan dan properti.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan judul: **“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat (1979-2008)”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian terhadap dua variabel yang berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sumatera Barat selama periode 1979-2008?
2. Seberapa jauh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sumatera Barat selama periode 1979-2008.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sumatera Barat selama periode 1979-2008.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor mana yang paling berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor selama periode 1979-2008.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi instansi pemerintahan daerah Sumatera Barat dapat menjadikan masukan dan bagi perencanaan pembangunan dan penganbilen keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi semua elemen masyarakat yang ingin mengetahui pengaruh PDRB dan jumlah kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat, serta dapat berperan aktif dalam rangka pelaksanaan pembangunan.
3. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.



## **1.6 Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang kebenarannya dapat diuji kembali. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil hipotesis bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat selama periode 1979-2008.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam menganalisis dalam menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat (1979-2008), akan dibagi atas beberapa Bab Pembahasan sebagai berikut.

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini memperlihatkan secara garis besar dari studi ini yang meliputi, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : LANDASAN TEORI DAN STUDI LITERATUR**

Bab ini berisi landasan teori dan pendokumentasian atau pengkajian hasil dari penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka.

### **Bab III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan penjelasan dan pembahasan mengenai jenis dan sumber data beserta metode analisa yang digunakan dalam penelitian.

#### Bab IV : GAMBARAN UMUM DAERAH SUMATERA BARAT

Bab ini berisikan gambaran secara umum atas subjek penelitian.

#### Bab V TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan implikasi kebijakan.

#### Bab VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN STUDI LITERATUR**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pemerintahan Daerah**

Indonesia yang berlandaskan paham Negara kesatuan, dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahannya di daerah menganut azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu (Medebewind). Ketiga azas tersebut merupakan landasan pokok dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang "Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah" dan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang telah digariskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Tap MPR NO.IV/1973).

Desentralisasi menurut UU No.22/1999 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI (Kuncoro, 2004). Dalam hal ini, prakarsa diserahkan kepada daerah, baik menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun segi pembiayaan dan perangkat.

Dekonsentrasi menurut UU No.22/1999 adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau perangkat pusat di daerah (Kuncoro,2004) Berdasarkan azas Dekonsentrasi, Negara Kesatuan RI dibagi dalam wilayah-wilayah administratif yang merupakan lingkungan wilayah-wilayah jabatan pada pejabat-pejabat pusat yang ditempatkan di daerah. Pejabat-pejabat tersebut merupakan wakil dari



pusat dan bertugas menyelenggarakan perintah-perintah menurut petunjuk atasannya di pusat.

Tugas pembantu menurut UU No.22/1999 adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan (Kuncoro, 2004) . Berdasarkan azas Tugas Pembantu maka beberapa tugas dan wewenang urusan pusat untuk pelaksanaannya diserahkan kepada dan dilakukan oleh daerah. Tetapi dalam hal menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan/pengawasan dan pembiayaan tetap menjadi tugas dan wewenang pusat.

Jadi, dalam hal desentralisasi, baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan/pengawasan, pelaksanaan maupun pembiayaan keseluruhan menjadi tugas dan wewenang daerah, sedangkan dalam hal dekonsentrasi kesemuanya berada ditangan pusat.

Untuk menetapkan bidang yang menjadi urusan dan wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka dapat diterapkan sistem pembagian antara lain (Kaho, 1998):

1. Sistem Residu

Secara umum tugas-tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat ditentukan terlebih dahulu, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah.

## 2. Sistem Material

Tugas-tugas pemerintah daerah ditetapkan satu per satu secara limitatif atau terinci, dan di luar dari tugas yang telah ditentukan merupakan urusan pemerintah pusat.

## 3. Sistem Formal

Sistem Formal urusan yang termasuk dalam rumah tangga daerah tidak secara apriori ditetapkan di dalam perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya. Tetapi tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi.

## 4. Sistem Otonomi Riil

Penyerahan urusan, tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat, serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.

## 5. Prinsip Otonomi Nyata, Dinamis dan Bertanggung jawab

Prinsip ini merupakan salah satu variasi dari sistem otonomi riil dimana penyerahan urusan-urusan kepada daerah dilakukan secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

### 2.1.2 Konsep Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *outus* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang. Menurut perkembangan sejarah



pemerintahan di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundang-undangan juga mengandung arti pemerintahan atau perundang-undangan sendiri (Pamudji, 1982).

Sesuai dengan Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan itu, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan (Berti, 2006)

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien dan efektif termasuk perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik (Abdullah, 2000).

Agar dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang menitik beratkan pada Daerah Tingkat II sesuai dengan tujuannya, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai prinsip sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan sesuai dengan kontitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya, berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.



6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan tugas pembantu tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah cukup besar, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Akan tetapi masih tetap dalam kerangka memperkuat negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami oleh setiap aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah pusat sebagai perumus kebijaksanaan.

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986) menegaskan beberapa ukuran sebagai berikut:

1. Kemampuan struktural organisasi

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya,



jumlah dan ragam unit cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

## 2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah

Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan.

## 3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

## 4. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dana antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

Menurut Kaho (1998), faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. Manusia adalah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Selanjutnya, faktor yang kedua ialah kemampuan keuangan daerah yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Manulang (1995) yang menyatakan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup baik Peralatan yang baik (praktis, efisien, dan efektif) dalam hal ini diperlukan bagi terciptanya suatu Pemerintah Daerah yang baik seperti alat-alat kantor, alat-alat komunikasi dan transportasi dan sebagainya.

Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya dengan

### **2.1.3 Keuangan Daerah**

Yang dimaksud dengan keuangan daerah dalam PP Nomor 105 tahun 2000 adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD” (Saragih,2003). Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya



keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu, juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat.

Kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahannya pada masa orde baru didasarkan pada UU. No. 5 Tahun 1974. Disamping mengatur pemerintahan daerah, Undang-undang tersebut juga menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya, pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan, dimana menurut pasal 55 UU No. 5 Tahun 1974, sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari 3 komponen besar, yaitu:



1. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:

- Hasil pajak daerah
- Hasil restribusi daerah
- Hasil perusahaan daerah (BUMD)
- Lain-lain hasil usaha daerah yang sah

2. Pendapatan yang berasal dari pusat, meliputi:

- Sumbangan dari pemerintah
- Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangundangan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Hubungan keuangan pusat-daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan itu. Tujuan utama hubungan ini ialah mencapai perimbangan antara berbagai pembagian ini bagaimana agar antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat sesuai. Lebih dasar lagi, hubungan pusat daerah menyangkut pembagian kekuasaan dalam pemerintah. Hak dalam mengambil keputusan mengenai anggaran pemerintah bagaimana memperoleh dan membelanjakannya unsur yang sangat penting untuk menjalankan kekuasaan (Devas,1989).

Berpijak pada tiga azas desentralisasi (dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantu), pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah didasarkan 4 prinsip sebagai berikut.

1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD
3. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN dan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD sebagai pihak yang menugaskan.
4. Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah daerah memberikan sejumlah sumbangan (Kuncoro, 2004).

Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian bagi pemerintah daerah Tingkat II Kabupaten atau Kota, disamping mendapat bantuan dari pemerintah pusat juga mendapat limpahan dari pemda Tingkat I Propinsi. Meskipun bisa jadi limpahan dana dari propinsi tersebut juga berasal dari pemerintah pusat lewat APBN (Landiyanto, 2005).

Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan satu paket Undang-undang otonomi daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 22 perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke



pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 25. Tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi (Ismail, 2002). Sumber-sumber keuangan daerah menurut UU. No 25 Tahun 1999 (Kuncoro, 2004) terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Dana Perimbangan,
3. Pinjaman daerah, dan
4. Lain-lain pendapatan yang sah (hibah dan dana darurat).

#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

Otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Adi, 2007). Semakin besar peran PAD terhadap APBD suatu daerah maka semakin berhasil pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerahnya. Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari pendapatan daerah termuat dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari:

1. Hasil Pajak daerah

Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pengembangan daerah.

2. Hasil Retibusi daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dalam bentuk balas jasa secara langsung atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi pemeliharaan dan pembangunan fasilitas jasa pelayanan umum. Klasifikasi jasa retribusi menurut UU No. 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut.

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta.

- c. Jasa perizinan, yaitu kegiatan tertentu dari pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Yang dimaksud hasil perusahaan daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Merupakan suatu jenis penerimaan daerah yang bersifat insidental yang belum diperkirakan sebelumnya. Penerimaan lain-lain ini berasal dari dinas-dinas daerah dalam batas-batas tertentu dan dapat didayagunakan sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan adanya imbalan.

### **2.1.5 Pajak Daerah**

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi regulator) (Suparmoko, 2002). Selanjutnya Devey (1988) mengemukakan pendapatnya tentang pajak daerah yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemda.
3. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya kepada, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemda.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi, meliputi :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Pemanfaatan Air Permukaan



2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

**2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, provinsi maupun kabupaten/kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. (Haryanto, 2005)

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa tolak ukur keberhasilan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tergambar dari peningkatan PDRB, struktur ekonomi, semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Secara tradisional, pembangunan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tergambar berapa jumlah dari semua barang dan jasa akhir. Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara perhitungan. Tiga cara perhitungan tersebut adalah sebagai berikut (Sukirno, 1994):

#### 1. Cara Produksi

Nilai seluruh produksi diperoleh dari menjumlahkan nilai-nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh berbagai industri yang ada dalam perekonomian. Hasil perhitungannya disebut PDRB. Unit-unit produksi tersebut sebelum tahun 1993 dikelompokkan dalam 11 lapangan usaha, sesudah tahun 1993 dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha. Unit-unit produksi sebelum tahun 1993 meliputi:

- a. Pertanian;
- b. Pertambangan dan Penggalan;
- c. Industri;
- d. Listrik dan Air Minum;
- e. Bangunan;
- f. Perdagangan Hotel dan Restoran;
- g. Pengangkutan dan Komunikasi;
- h. Bank dan Lembaga Keuangan ;
- i. Sewa Rumah;
- j. Pemerintahan dan Pertahanan dan
- k. Jasa-Jasa.

Sedangkan unit-unit produksi sesudah tahun 1993 meliputi:

- a. Pertanian;
- b. Pertambangan dan Penggalian;
- c. Industri Pengolahan;
- d. Listrik Gas Dan Air Bersih;
- e. Bangunan;
- f. Perdagangan, Hotel dan Restoran;
- g. Pengangkutan dan Komunikasi;
- h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan;
- i. Jasa-Jasa.

## 2. Cara pengeluaran

Nilai seluruh produksi diperoleh dari penjumlahan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan rumah-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, pemerintah dan luar negeri atas produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah,

## 3. Cara pendapatan

Nilai seluruh produksi dalam perekonomian diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan seluruh faktor produksi yang digunakan dalam produksi, yaitu pendapatan dari sumber alam, tenaga kerja, modal yang ditawarkan dan keahlian kepemimpinan.

## 2.2 Studi Literatur

Adi (2007) dalam penelitiannya “Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi” dengan variabel



penelitian pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengambil sampel penelitian daerah kabupaten dan kota se-Jawa dan Bali, tidak termasuk daerah pemekaran dari tahun 1998-2004. Dari penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanya saja pertumbuhan ini tidak diikuti dengan peningkatan peran (*share*) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja. Terdapat indikasi masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kemampuan keuangan kabupaten dan kota juga mengalami perubahan yang cukup berarti. Peta kemampuan keuangan yang disusun dengan menggunakan metode indeks kemampuan keuangan menunjukkan adanya pergeseran kemampuan keuangan daerah ke arah yang lebih baik. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan kemampuan keuangan ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi.

Thesaurianto (2007) dalam penelitiannya “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah”. Menemukan bahwa jumlah transfer pemerintah, jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, jumlah kendaraan roda 2, dan investasi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu jumlah transfer pemerintah, jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, jumlah kendaraan roda 2 dan investasi daerah sebesar 96,9 persen.

Santosa (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya

Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri”. Variabel yang digunakan dalam penelitaian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah. Dari peneltian ini diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi presentasi perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB sangat kuat. Hal ini didukung dengan tingkat koefisiensi determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,971. Ketiga variabel independen (Pengeluaran Pembangunan, Penduduk dan PDRB), yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel penduduk sebesar 8,049.

Iswardono, Agus Suhartono dan Sumsubar Saleh (1992) menganalisis tentang “Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Kotamadya Yogyakarta. Penelitian ini menemukan secara umum Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu pertumbuhan penduduk, Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan inflasi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat selama periode 1979-2008. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena kedua variabel tersebut diduga mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat.

#### **3.2. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **3.3 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan keuangan daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah



dipisahkan dari komponen pajak dan retribusi, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah (Chalid,2005).

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir (semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (satu tahun)) (Sukirno, 1994). Menurut buku Produk Domestik Regional Bruto (PDBR) Sumatera Barat (2008), PDRB dapat menjelaskan tiga pengertian, yaitu:
  - a. Menurut pengertian produksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang beroperasi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
  - b. Menurut pengertian pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai balas jasa yang diterima atas penggunaan faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
  - c. Menurut pengertian pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor netto di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
3. Jumlah Kendaraan bermotor adalah total kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang, bis, mobil gerobak (truk) dan sepeda motor di Sumatera Barat.

**3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut runtun waktu (*time series*) dalam bentuk tahunan dari tahun 1979-2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1. Besarnya PAD pemerintah daerah Sumatera Barat
- 2. Besarnya PDRB pemerintah daerah Sumatera Barat
- 3. Jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat

Data sekunder tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

**3.5 Metode Analisis Data**

**3.5.1 Pembentukan Model**

Menurut Kuncoro (2001) dan Devas (1989) ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli daerah (PAD), antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, sumber daya manusia dan jumlah kendaraan bermotor. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel jumlah kendaraan bermotor sebagai variabel independen yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena kedua variabel independen tersebut diduga memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat.

Adapun faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah kendaraan bermotor. Kondisi ini dapat ditulis dalam bentuk suatu fungsi sebagai berikut:

$$T = f(YP, Kb).....(1)$$



Dimana:

T = Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

YP = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

Kb = Jumlah Kendaraan Bermotor

Analisis selanjutnya, variabel T diganti dengan Yt, variabel YP diganti dengan X<sub>1</sub>, dan variabel Kb diganti dengan X<sub>2</sub>, sehingga persamaan (1) akan menjadi:

$$Y_t = f(X_1, X_2) \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

Yt = Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X<sub>1</sub> = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

X<sub>2</sub> = Jumlah Kendaraan Bermotor

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode OLS (*Ordinary Least Squares*). Metode ini dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss. Secara umum bentuk persamaan yang dikemukakan sebagai berikut: (Gujarati, 1999)

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i \dots \dots \dots (3)$$

Berdasarkan metode tersebut dengan mengubah T menjadi Yt, Yp menjadi X<sub>1</sub> dan Kb menjadi X<sub>2</sub>, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + U \dots \dots \dots (4)$$

Dengan memperhatikan persamaan diatas dan menganggap  $\beta = b$ , maka persamaan (4) diatas dapat diubah menjadi:

$$Y_t = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + U \dots \dots \dots (5)$$

Melihat elastisitas dari persamaan di atas, maka persamaan dirubah dalam bentuk *Double Log Transformation*, dengan memakai metode *Ordinary Least*



*Squares*. Dengan memakai *Double Log Transformation*, maka koefisien regresi yang dipadat langsung merupakan elastisitasnya. Sehingga persamaan diatas dapat dirubah menjadi:

$$\text{Log } Y_t = b_0 + b_1 \log X_1 + b_2 \log X_2 + \log U \dots\dots\dots(6)$$

Dimana;

$Y_t$  = Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$X_1$  = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

$X_2$  = Jumlah Kendaraan Bermotor

$b_0$  = Konstanta

$b_1$  = Elastisitas Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) terhadap  
Penerimaan Asli Daerah (PAD)

$b_2$  = Elastisitas jumlah kendaraan bermotor terhadap PAD

$U$  = Variabel pengganggu

### 3.5.2 Pengujian Model

#### 3.5.2.1 Uji Regresi

##### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2001). Tingkat ketepatan regresi ditunjukkan oleh besarnya Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) yang besarnya adalah nol dan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Apabila Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sama dengan nol, berarti variabel-variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai tersebut semakin mendekati satu berarti variabel independen

semakin berpengaruh terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan untuk menghitung Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah

$$R^2 = 1 - \frac{\sum ei^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}$$

## 2. Pengujian T-Tes

Uji T-tes pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $b_i$ ) sama dengan nol, atau

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ), parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a : b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen (Kuncoro: 2001).

Cara pengujian uji T-tes adalah dengan membandingkan T-tabel dengan T-hitung, dimana jika nilai T-hitung yang diperoleh lebih besar dari pada T-tabel, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah signifikan. Dan sebaliknya, apabila T-hitung yang diperoleh lebih kecil dari T-tabel berarti hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat tidak. Rumus yang digunakan untuk uji t (t-tes) adalah:

$$t = \frac{\beta_i}{s\beta_i}$$

Dimana :

$t$  = Nilai mutlak pengujian ( $t$ -hitung)

$\beta_i$  = Koefisien regresi

$S\beta_i$  = Standar deviasi  $\beta_i$

### 3. Pengujian F-Tes

Uji F-tes pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_a: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2001).

Cara pengujian uji F-tes adalah dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel dimana jika F-hitung lebih besar dari pada F-tabel, maka berarti secara keseluruhan variabel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dan sebaliknya, jika F-hitung yang diperoleh lebih kecil dari F-tabel berarti pengaruh dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. Rumus yang digunakan untuk F-tes adalah:

$$F = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(n-k)}$$



Dimana

$K$  = jumlah parameter (jumlah koefisien regresi termasuk konstanta) adalah jumlah tahun pengamatan

$n-1$  = degree of freedom numerator

$n-k$  = degree of freedom denominator

### 3.5.2.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara satu variabel independen dengan variabel independen lain. Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat diketahui jika nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan jika *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model terbebas dari multikolinearitas (Nugroho, 2005).

#### 2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Deleted Residual* nilai tersebut. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot* model tersebut.

Analisis pada gambar *Scatterplot* yang menyatakan model regresi linear berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

- a. Titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik data sebaiknya tidak berpola (Nugroho, 2005).

### 3. Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu ( $e_t$ ) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya ( $e_{t-1}$ ). Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data *time series* dengan n-sampel adalah periode waktu (Nugroho, 2005).

Cara mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW). Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

- a. Bila nilai DW lebih besar dari daripada batas atas (*upper bound*, U), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol Artinya tidak ada autokorelasi positif.

- b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah (*lower bound*, L), koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol. Artinya ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW terletak diantara batas atas dan batas bawah, maka tidak dapat disimpulkan (Kuncoro, 2001).



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH SUMATERA BARAT**

#### **4.1 Keadaan Umum Sumatera Barat**

##### **4.1.1 Letak Geografis**

Sumatera Barat secara geografis terletak antara  $0^{\circ} 54'$  Lintang Utara dan  $3^{\circ} 30'$  Lintang Selatan serta  $98^{\circ} 36'$  dan  $101^{\circ} 53'$  Bujur Timur. Wilayah Sumatera Barat dilalui garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat), tepatnya berada di kecamatan Bonjol kabupaten Pasaman Barat. Kondisi ini menyebabkan wilayah Sumatera Barat beriklim tropis.

Sumatera Barat tercatat memiliki luas daerah sekitar 42,2 ribu  $\text{Km}^2$ . Luas tersebut setara dengan 2,20 persen dari luas Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Barat terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Batas-batas wilayah Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Bengkulu dan Jambi
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jambi dan Riau
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Propinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 daerah kabupaten dan kota, dengan rincian 12 daerah kabupaten dan 7 daerah kota. Dari 19 daerah kabupaten tersebut, kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu  $\text{Km}^2$  atau 14,21 persen dari luas wilayah Sumatera Barat. Sedangkan kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,0  $\text{Km}^2$  atau 0,05 persen dari luas wilayah Sumatera Barat. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan

pembagian wilayah Sumatera Barat berdasarkan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota.

**Tabel 4.1**  
**Pembagian Wilayah Provinsi Sumatera Barat**  
**Menurut Luas Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Luas daerah Km	Persentase (%)
	<b>Kabupaten</b>		
1	Kab. Mentawai	6,011.35	14.21
2	Pesisir Selatan	5,794.95	13.70
3	Solok	3,738.00	8.84
4	Sijunjung	3,130.80	7.40
5	Tanah Datar	1,336.00	3.16
6	Padang Pariaman	1,328.79	3.14
7	Agam	2,232.30	5.28
8	50 Kota	3,354.30	7.93
9	Pasaman	4,447.63	10.52
10	Solok Selatan	3,346.20	7.91
11	Dharmasraya	2,961.13	7.00
12	Pasaman Barat	3,387.77	8.01
	<b>Kota</b>		
13	Padang	694.96	1.64
14	Solok	57.64	0.14
15	Sawahlunto	273.45	0.65
16	Padang Panjang	23.00	0.05
17	Bukittinggi	25.24	0.06
18	Payakumbuh	80.43	0.19
19	Pariaman	73.36	0.17
	<b>Total</b>	<b>42,297.30</b>	<b>100.00</b>

*Sumber: PBS, Sumatera Barat Dalam Angka*

Selanjutnya, kondisi alam Sumatera Barat hingga saat ini masih diliputi oleh kawasan lindung yang mencapai 45,17 persen dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya tercatat sebesar 23.190,11 Km<sup>2</sup> atau sekitar 54,83 persen dari kawasan keseluruhan. Keadaan topografi wilayah Sumatera Barat bervariasi, mulai dari wilayah datar, landai, bergelombang, serta wilayah dengan kondisi alam yang terjal/curam dan



berbukit. Kondisi topografi ini mengakibatkan wilayah Sumatera Barat memiliki banyak obyek wisata alam.

Selain itu, Sumatera Barat juga memiliki gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat di hampir semua kabupaten dan kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau. Gunung dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut ini, terletak di Kabupaten Pasaman Barat.

#### **4.1.2 Penduduk**

Penduduk adalah orang yang tinggal menetap dalam suatu wilayah (telah tinggal 6 bulan) atau yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud menetap (BPS,2000). Jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatan perkapita suatu daerah, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian daerah tersebut. Dalam hal ini, ada yang berpendapat bahwa jumlah penduduk yang besar sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi. Di sisi lain, jumlah penduduk yang sedikitlah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi (Yasin, 2004).

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Wirosardjono dalam Santosa, 2005).



Sementara itu, pertumbuhan jumlah penduduk Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk ini diharapkan agar penduduk dapat dijadikan sebagai modal dalam pembangunan ekonomi daerah. Terlebih dalam era otonomi daerah ini di tuntut kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga, dengan jumlah penduduk yang meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. Untuk melihat pertumbuhan jumlah penduduk Sumatera Barat tergambar dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Sumatera Barat**  
**Pada tahun 2000-2008**

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)
1	2000	4,220,318	-
2	2001	4,243,510	0.55
3	2002	4,289,647	1.09
4	2003	4,456,816	3.90
5	2004	4,528,242	1.60
6	2005	4,555,810	0.61
7	2006	4,632,152	1.68
8	2007	4,697,764	1.42
9	2008	4,763,099	1.39
<b>Rata-rata</b>			<b>1.53</b>

*Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)*

Dari Tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk Sumatera Barat selama tahun 2000-2008 mengalami peningkatan. Dilihat dari pertumbuhan penduduk, rata-rata pertumbuhan penduduk Sumatera Barat pada tahun 2000 hingga 2008 adalah 1,53 persen. Pertumbuhan penduduk Sumatera Barat yang paling tinggi terjadi pada tahun 2003 dengan angka pertumbuhan mencapai 3,90 persen dengan jumlah penduduk 4.456.816 jiwa. Angka pertumbuhan ini lebih dari dua kali lipat dari rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2000-2008.

Sementara itu, tingkat pertumbuhan Sumatera Barat yang paling rendah terjadi pada tahun 2001 dengan angka pertumbuhan hanya mencapai 0,55 persen dan dengan jumlah penduduk 4.243.510 jiwa.

Terjadinya perubahan jumlah penduduk di Sumatera Barat tidak terlepas dari faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Perpindahan penduduk keluar ataupun masuk wilayah Sumatera Barat sangat besar pengaruhnya terhadap jumlah penduduk Sumatera Barat. Karena faktor kebiasaan masyarakat Minang yang suka merantau. Di samping itu, dengan adanya beberapa sekolah atau perguruan tinggi yang diminati masyarakat di luar Sumatera Barat, akan mendorong orang datang ke Sumatera Barat.

Selanjutnya, jumlah angkatan kerja pada tahun 2008 sebanyak 2.127.512 jiwa, terdiri dari 1.280.972 laki-laki dan 846.540 perempuan. Jumlah angkatan kerja tersebut adalah 63,98 persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat, yang berumur 15 tahun ke atas. Angkatan kerja terdiri atas dua golongan yaitu penduduk bekerja dan pengangguran. Jumlah penduduk yang bekerja adalah 1.956.378 jiwa, dan yang tergolong pengangguran sebanyak 171.134 jiwa (BPS,2008).

Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut mata pencaharian, pada tahun 2008 sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan merupakan sektor yang mendominasi. Tabel 4.3 menggambarkan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas, yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. 47,25 persen bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, dan lebihnya 52,75 persen bekerja pada sektor lain.



**Tabel 4.3**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas**  
**yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**  
**Pada Tahun 2008 di Sumatera Barat**

No	Lapangan Usaha	Jumlah	Persentase
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	924,314	47.25
2	Pertambangan	17,797	0.91
3	Industri Pengolahan	128,357	6.56
4	Listrik, Gas dan Air	3,981	0.20
5	Bangunan	88,423	4.52
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	396,024	20.24
7	Angkutan, Pergunangan, Konumikasi	125,807	6.43
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	17,085	0.87
9	Jasa Kemasyarakatan	254,590	13.01
	<b>Total</b>	<b>1,956,378</b>	<b>100.00</b>

*Sumber: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka*

Banyaknya jumlah penduduk di Sumatera Barat yang bekerja pada sektor pertanian, tidak terlepas dari kondisi daerah tersebut yang mempunyai lahan yang besar untuk pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan dan pertambangan.

#### **4.1.3 Keuangan dan Perbankan**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat pada tahun 2007 adalah 2.74 triliun rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2008 yang mencapai 3,61 triliun. Peningkatan itu terjadi baik dari pos pendapatan maupun belanja daerah. Realiasi pendapatan daerah pada tahun 2008 adalah 1,72 triliun rupiah. Realisasi ini meningkat 34,52 persen dibandingkan dengan tahun 2007 yang terealisasi sebanyak 1,28 triliun rupiah. Sementara itu, belanja daerah pada tahun 2008 adalah sebesar 1,64 triliun rupiah. Realisasi



belanja ini meningkat 31,50 persen dibandingkan tahun 2007 yang terealisasi sebanyak 1,24 triliun rupiah.

Penerimaan daerah Sumatera Barat pada tahun 2008 didominasi dari dua sumber utama. Kedua sumber ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (790.087,77 juta rupiah) dan dana perimbangan (744.202.07 juta rupiah). Berbeda dengan kondisi pada tahun 2007, sumber pendapatan Sumatera Barat terbesar berasal dari dana perimbangan.

Sementara itu, seiring dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian, pada tahun 2008 jumlah aktiva bank naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 jumlah aktiva bank mencapai 21.33 triliun rupiah, sedangkan tahun 2007 mencapai 19.88 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah aktiva pada bank-bank yang berada di bawah naungan Bank Indonesia Cabang Padang sebesar 6,33 persen.

Selanjutnya, jumlah aktiva bank umum tahun 2008 adalah sebanyak 20,37 triliun rupiah, dengan penghimpunan dana rupiah dan valuta asing terbanyak tahun 2008 adalah kota Padang sebesar 12,76 triliun rupiah.

#### **4.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut mandiri dalam melaksanakan pembangunan daerahnya. Kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan berapa besar kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka daerah tersebut dinilai semakin mandiri dan berhasil melaksanakan otonomi daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 1979-2008 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah ( PAD)**  
**Sumatera Barat Pada Tahun 1979-2008**  
**(Dalam Ribuan)**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan (%)
1	1979	3,507,180	-
2	1980	4,251,333	21.22
3	1981	5,537,865	30.26
4	1982	6,354,378	14.74
5	1983	7,601,315	19.62
6	1984	8,737,608	14.95
7	1985	9,762,018	11.72
8	1986	11,022,542	12.91
9	1987	11,559,990	4.88
10	1988	15,554,592	34.56
11	1989	18,777,162	20.72
12	1990	20,281,370	8.01
13	1991	22,249,859	9.71
14	1992	24,920,998	12.01
15	1993	28,336,974	13.71
16	1994	41,005,009	44.70
17	1995	52,790,535	28.74
18	1996	59,123,677	12.00
19	1997	63,315,546	7.09
20	1998	49,043,849	-22.54
21	1999	56,321,020	14.84
22	2000	85,157,383	51.20
23	2001	140,763,201	65.30
24	2002	213,275,546	51.51
25	2003	281,449,460	31.97
26	2004	375,074,888	33.27
27	2005	448,279,018	19.52
28	2006	494,929,542	10.41
29	2007	621,607,519	25.60
30	2008	790,087,767	27.10
<b>Rata-Rata</b>			<b>21.71</b>

*Sumber: Data 1979-1986 dari BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)*

*Data 1987-2008 dari BPS, Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, berbagai edisi (data diolah)*



Dari Tabel diatas, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat pada tahun 1979-2008 secara umum mengalami peningkatan setiap tahun dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi. Namun pada tahun 1998 terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat yang signifikan dengan angka pertumbuhan mencapai -22,54 persen. Penurunan pertumbuhan ini jauh dari pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 1979-2008 yaitu 21,71 persen. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 tersebut. Penurunan sangat besar terjadi pada penerimaan restribusi daerah dan pajak daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan Tahun berikutnya, tahun 1999 kembali meningkat mencapai 14,87 persen.

Sementara itu tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat yang paling tinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu mencapai 65,30 persen. Hal ini disebabkan pada tahun 2001 tersebut, terjadi peningkatan yang signifikan dari penerimaan pajak daerah disamping sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Peningkatan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat pada tahun 2001 mencapai 66,62 persen. Tahun selanjutnya (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat terus mengalami peningkatan hingga tahun 2008 dengan tingkat pertumbuhan yang mencapai 27,10 persen.

#### **4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Kondisi perekonomian pada suatu daerah dapat ditunjukkan oleh indikator-indikator makroekonomi, yaitu Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), struktur perekonomian, laju pertumbuhan, pendapatan perkapita, *value added* yang dihasilkan, dan lain-lain. Salah satu indikator yang akan dibahas dalam bab ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Secara definisi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator yang dapat menunjukkan kondisi ekonomi suatu daerah, terbagi atas dua yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

#### **4.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku**

Tabel dibawah ini akan memperlihatkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat atas dasar harga berlaku.



**Tabel 4.5**  
**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat Atas**  
**Dasar Harga Berlaku Pada Tahun 1979-2008**  
**(dalam jutaan)**

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Pertumbuhan (%)
1	1979	498,217.77	-
2	1980	670,767.65	34.63
3	1981	862,544.29	28.59
4	1982	1,066,683.41	23.67
5	1983	1,234,254.79	15.71
6	1984	1,441,761.92	16.81
7	1985	1,615,789.17	12.07
8	1986	1,847,253.49	14.33
9	1987	2,205,364.48	19.39
10	1988	2,561,235.70	16.14
11	1989	2,913,314.76	13.75
12	1990	3,302,504.38	13.36
13	1991	3,733,094.82	13.04
14	1992	4,273,614.68	14.48
15	1993	6,027,052.82	41.03
16	1994	7,217,921.04	19.76
17	1995	8,267,123.47	14.54
18	1996	9,514,827.06	15.09
19	1997	10,744,737.28	12.93
20	1998	17,714,366.69	64.87
21	1999	20,514,655.03	15.81
22	2000	22,462,448.31	9.49
23	2001	26,154,134.82	16.43
24	2002	29,889,129.81	14.28
25	2003	33,130,682.95	10.85
26	2004	37,358,645.93	12.76
27	2005	44,674,569.24	19.58
28	2006	53,029,588.10	18.70
29	2007	59,799,045.30	12.77
30	2008	70,614,210.04	18.09
<b>Rata-Rata</b>			<b>19.07</b>

*Sumber : BPS, PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Berbagai Edisi (data diolah)*

Dari tabel di atas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat atas harga berlaku mengalami peningkatan tiap tahunnya,



dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi. Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang paling tinggi terjadi pada tahun 1998 yang mencapai 64,87 persen. Hal ini disebabkan karena krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 tersebut. Akibatnya, inflasi sangat tinggi bahkan hingga kuartal IV inflasi Indonesia mencapai 77,63 persen. Khusus di Sumatera Barat, peningkatan laju inflasi yang sangat tajam terjadi pada semua kelompok barang, bahkan untuk kelompok bahan makanan telah melampaui angka 100 persen yaitu 140,66 persen (BPS, 1998).

Sementara itu, tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) paling rendah terjadi pada tahun 2000 yang hanya mencapai 9,49 persen. Hal ini karena terjadinya penurunan kontribusi subsektor non migas, subsektor bank, subsektor sewa bangunan dan sektor jasa-saja sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selanjutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah. Struktur perekonomian Sumatera Barat hingga tahun 2008 masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Peranan sektor-sektor tersebut secara total melebihi 57 persen.

Sektor pertanian Sumatera Barat lima tahun terakhir (2004-2008) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2004 peranan sektor pertanian 24,27 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2005 menjadi 25,59 persen. Namun, tiga tahun berikutnya sektor pertanian terus mengalami penurunan yaitu 25,26 persen pada tahun 2006, 24,67 persen pada tahun 2007, dan 24,46 persen pada tahun 2008.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan penyumbang kedua terbesar setelah sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat. Seperti halnya sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir (2004-2008). Pada tahun 2004 kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sebesar 18,80 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 17,46 persen, dan kembali turun pada tahun 2006 menjadi 16,96 persen. Sedangkan pada tahun 2007 hingga tahun 2008 mulai menunjukkan peningkatan menjadi 17,34 persen pada tahun 2007 dan 17,74 persen pada tahun 2008.

Selanjutnya, sektor jasa-jasa merupakan penyumbang ketiga terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat. Sektor jasa-jasa pada lima tahun terakhir (2004-2008) juga mengalami fluktuasi yakni terjadi penurunan pada tahun 2004-2007. Penurunannya masing-masing adalah 16,87 persen pada tahun 2004, 16,31 persen pada tahun 2005, 15,79 persen pada tahun 2006, dan 15,64 persen pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008 sektor jasa-jasa mulai meningkat menjadi 15,68 persen.

Selain dari ketiga sektor dominan tersebut, sektor pengangkutan dan komunikasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar, yakni 12-15 persen dalam lima tahun terakhir (2004-2008). Selanjutnya diikuti sektor industri pengolahan, dengan kontribusi 11-12 persen dalam lima tahun terakhir (2004-2008). Sektor yang paling kecil memberikan kontribusinya adalah sektor listrik, gas dan air bersih yakni berkisar 1 persen dalam lima tahun terakhir (2004-2008).

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha dari tahun 2004-2008.



**Tabel 4.6**  
**Distribusi Persentase dan Rata-Rata Distribusi PDRB Sumatera Barat**  
**Berdasarkan Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>24.27</b>	<b>25.59</b>	<b>25.26</b>	<b>24.67</b>	<b>24.46</b>	<b>24.85</b>
a. Tanaman Pangan	11.97	13.41	13.11	12.52	12.55	12.71
b. Perkebunan	5.58	5.68	5.61	5.61	5.45	5.59
c. Peternakan	2.31	2.12	2.04	2.02	1.97	2.09
d. Kehutanan	1.71	1.48	1.50	1.56	1.56	1.56
e. Perikanan	2.70	2.90	3.01	2.96	2.94	2.90
<b>2. PERTAMBANGAN &amp; PENGGALIAN</b>	<b>3.52</b>	<b>3.39</b>	<b>3.45</b>	<b>3.44</b>	<b>3.33</b>	<b>3.43</b>
a. Migas dan Gas Bumi	-	-	-	-	-	-
b. Non Migas	0.55	0.49	0.49	0.48	0.44	0.49
c. Penggaliaan	2.97	2.90	2.96	2.97	2.89	2.94
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>12.25</b>	<b>11.38</b>	<b>11.42</b>	<b>12.01</b>	<b>12.11</b>	<b>11.83</b>
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	12.25	11.38	11.42	12.01	12.11	11.83
<b>4. LISTRIK, GAS &amp; AIR BERSIH</b>	<b>1.47</b>	<b>1.49</b>	<b>1.42</b>	<b>1.37</b>	<b>1.22</b>	<b>1.39</b>
a. Listrik	1.35	1.38	1.31	1.27	1.12	1.29
b. Gas						
c. Air Bersih	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11
<b>5. BANGUNAN</b>	<b>5.37</b>	<b>5.53</b>	<b>5.61</b>	<b>5.50</b>	<b>5.53</b>	<b>5.51</b>
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL &amp; RESTORAN</b>	<b>18.80</b>	<b>17.46</b>	<b>16.96</b>	<b>17.34</b>	<b>17.74</b>	<b>17.66</b>
a. Perdagangan Besar dan Eceran	18.15	16.84	16.36	16.75	17.18	17.06
b. Hotel	0.17	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16
c. Restoran	0.48	0.46	0.45	0.43	0.41	0.45
<b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	<b>12.28</b>	<b>13.81</b>	<b>15.13</b>	<b>15.07</b>	<b>15.02</b>	<b>14.26</b>
a. Angkutan	10.09	11.31	12.53	12.33	12.32	11.72
b. Komunikasi	2.19	2.50	2.59	2.74	2.70	2.54
<b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN, &amp; JASA PERUSAHAAN</b>	<b>5.17</b>	<b>5.03</b>	<b>4.96</b>	<b>4.96</b>	<b>4.90</b>	<b>5.00</b>
a. Bank	1.78	1.54	1.49	1.55	1.53	1.58
b. Lembaga keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunjang	1.20	1.24	1.28	1.24	1.20	1.23
c. Sewa Bangunan	2.05	2.11	2.05	2.03	2.04	2.06
d. Jasa Perusahaan	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>16.87</b>	<b>16.31</b>	<b>15.79</b>	<b>15.64</b>	<b>15.68</b>	<b>16.06</b>
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	11.58	11.24	10.83	10.73	10.81	11.04
b. Swasta	5.30	5.07	4.96	4.91	4.87	5.02
<b>PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: BPS. PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 (data diolah)

#### 4.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan

Tabel dibawah ini akan memperlihatkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat atas dasar harga konstan 2000.

**Tabel 4.7**  
**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat Atas**  
**Dasar Harga konstan 2000 Pada Tahun 1979-2008**  
**(dalam jutaan)**

NO	TAHUN	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Pertumbuhan (%)
1	1979	6,782,326.66	-
2	1980	7,445,094.91	9.77
3	1981	8,218,360.68	10.39
4	1982	8,991,626.45	9.41
5	1983	9,472,532.69	5.35
6	1984	9,979,159.60	5.35
7	1985	10,481,785.41	5.04
8	1986	11,029,556.83	5.23
9	1987	11,754,800.82	6.58
10	1988	12,603,025.18	7.22
11	1989	13,488,826.14	7.03
12	1990	14,340,693.47	6.32
13	1991	15,300,766.91	6.69
14	1992	16,359,010.84	6.92
15	1993	17,577,180.59	7.45
16	1994	18,886,061.06	7.45
17	1995	20,572,727.51	8.93
18	1996	22,192,330.52	7.87
19	1997	23,332,977.85	5.14
20	1998	21,817,711.36	-6.49
21	1999	22,097,521.73	1.28
22	2000	22,889,614.05	3.58
23	2001	23,727,373.93	3.66
24	2002	24,840,187.76	4.69
24	2003	26,146,781.63	5.26
25	2004	27,578,136.56	5.47
27	2005	29,159,480.53	5.73
28	2006	30,949,945.10	6.14
29	2007	32,912,968.59	6.34
30	2008	35,007,921.57	6.37
<b>Rata-Rata</b>			<b>5.87</b>

*Sumber : BPS, PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha, Berbagai Edisi (data diolah)*



Dari tabel diatas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat atas dasar harga konstan 2000 tahun 1979-2008 secara umum mengalami peningkatan pada setiap tahun, dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi. Namun, pada tahun 1998 terjadi penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai -6,49 persen. Penurunan ini sangat jauh di bawah pertumbuhan rata-rata selama tahun 1979-2008 yaitu 5,87 persen. Hal ini disebabkan karena terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 tersebut. Pada tahun 1998 hampir seluruh sektor mengalami penurunan. Sektor yang tidak mengalami penurunan hanya sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta sektor Jasa-Jasa. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih tumbuh dengan 9,23 persen sedangkan sektor Jasa-Jasa tumbuh dengan 2,13 persen.

Kemudian, tahun berikutnya tahun 1999, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai membaik hingga tahun 2008 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,37 persen. Sementara itu, tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi terjadi pada tahun 1981, yang mencapai 10,39 persen. Peningkatan pertumbuhan ini hampir dua kali lipat dari pertumbuhan rata-rata selama tahun 1979-2008. Hal ini karena pada tahun 1981 tersebut, semua sektor mengalami kenaikan yang signifikan. Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor Listrik dan Air Minum yang mencapai 37,35 persen.

Selanjutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dibidang ekonomi. Pertumbuhan



tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir (2004-2008), menunjukkan pertumbuhan yang positif, tetapi cukup mengalami fluktuasi. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan sebesar 5,60 persen, dan terus membaik sampai tahun 2007 dengan angka pertumbuhan 6,37 persen. Namun pada tahun 2008 terjadi penurunan menjadi 6,13 persen.

Sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat terus mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Namun pada tahun 2008 mulai menunjukkan peningkatan. Penurunan dalam sektor pertanian ini disebabkan oleh karena melemahnya pertumbuhan dua sub sektornya, yaitu perkebunan dan kehutanan.

Sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2004 pertumbuhan sebesar 3,26 persen, dan pada tahun 2005 mengalami penurunan pertumbuhan yaitu sebesar 3,09 persen. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya produksi sirtukil. Namun pada tahun 2008 sektor pertambangan dan penggalian ini mengalami peningkatan pertumbuhan dari tahun 2007 yaitu sebesar 5,10 persen. Peningkatan Pertumbuhan ini disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan sub sektor penggalian dari 5,27 persen pada tahun 2007 menjadi 5,85 persen pada tahun 2008.

Sektor industri pengolahan yang kontribusinya berasal dari dari sub sektor tanpa migas juga mengalami pertumbuhan. Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4,53 persen pada tahun 2004, dan meningkat secara signifikan pada tahun 2008 menjadi 6,06 persen. Peningkatan ini menandakan mulai membaiknya kondisi aspek kehidupan masyarakat dan meningkatnya kinerja sektor industri, seperti yang terjadi pada produksi semen.

Sektor listrik, gas dan air bersih pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu sebesar 12,51 persen, sementara pada tahun 2004 hanya 5,29 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya sub sektor listrik. Namun pada tahun 2008 pertumbuhannya melemah menjadi 3,33 persen.

Sektor bangunan juga mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun pada tahun 2007 sektor bangunan pertumbuhannya mencapai 5,33 persen, dan tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 6,88 persen.

Kemudian, sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan penyumbang kedua setelah pertanian dalam PDRB. Dalam lima tahun terakhir (2004-2008) sektor ini mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,33 persen. Pada tahun 2008 sektor ini mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 6,70 persen (2008) turun dari 6,95 persen (2007). Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada sub sektor perdagangan besar dan eceran.

Selanjutnya, sektor angkutan dan komunikasi, pada tahun 2005 mengalami peningkatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya yaitu 8,03 persen (2004) meningkat menjadi 9,81 persen (2005). Peningkatan ini disebabkan karena



sub sektor yang membentuknya yaitu komunikasi. Dibandingkan dari berbagai sub sektor yang membentuk PDRB, sub sektor komunikasi memiliki nilai pertumbuhan yang tertinggi dengan nilai mencapai 24,42 persen pada tahun 2005. Sementara itu, sektor angkutan dan komunikasi pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 8,61 persen dari 9,33 persen pada tahun 2007.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2008 juga mengalami pertumbuhan yang melemah dari 7,17 persen pada tahun 2007 menjadi 6,99 persen pada tahun 2008.

Sektor jasa-jasa yang merupakan sektor dominan ketiga setelah sektor pertanian dan perdagangan, hotel serta restoran, pada tahun 2004 memiliki nilai pertumbuhan sebesar 3,67 persen. Dan pada tahun 2008 sektor ini, mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 6,55 persen. Dilihat dari sub sektor pembentuknya, dalam lima tahun terakhir (2004-2008) sub sektor swasta memiliki nilai pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sub sektor pemerintah umum dan pertahanan. Sub sektor swasta nilai pertumbuhannya berkisar 6-8 persen, sedangkan sub sektor pemerintah umum dan pertahanan berkisar 2-6 persen.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi.



**Tabel 4.8**  
**Pertumbuhan Masing-Masing Sektor Lapangan Usaha**  
**dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>5.79</b>	<b>5.13</b>	<b>5.01</b>	<b>4.97</b>	<b>4.96</b>	<b>5.17</b>
a. Tanaman Pangan	5.47	5.09	4.22	4.57	4.75	4.82
b. Perkebunan	11.62	9.97	9.39	8.75	5.86	9.12
c. Peternakan	-3.50	2.73	2.09	3.13	4.63	1.82
d. Kehutanan	3.67	-5.58	-1.32	-4.35	-0.40	-1.60
e. Perikanan	5.33	4.74	5.43	5.18	6.87	5.51
<b>2. PERTAMBANGAN &amp; PENGGALIAN</b>	<b>3.26</b>	<b>3.09</b>	<b>3.04</b>	<b>4.89</b>	<b>5.10</b>	<b>3.88</b>
a. Migas dan Gas Bumi						
b. Non Migas	-11.57	-1.05	2.95	3.28	1.77	-0.92
c. Penggaliaan	7.64	4.09	3.06	5.27	5.85	5.18
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>4.53</b>	<b>4.93</b>	<b>4.47</b>	<b>5.79</b>	<b>6.06</b>	<b>5.16</b>
a. Industri Migas						
b. Industri Tanpa Migas	4.53	4.93	4.47	4.59	6.06	4.92
<b>4. LISTRIK, GAS &amp; AIR BERSIH</b>	<b>5.90</b>	<b>12.51</b>	<b>8.93</b>	<b>6.90</b>	<b>3.33</b>	<b>7.51</b>
a. Listrik	5.99	12.98	9.15	6.92	2.99	7.61
b. Gas						
c. Air Bersih	5.10	8.25	6.73	6.95	6.70	6.75
<b>5. BANGUNAN</b>	<b>7.62</b>	<b>4.69</b>	<b>7.26</b>	<b>5.33</b>	<b>6.88</b>	<b>6.36</b>
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL &amp; RESTORAN</b>	<b>5.29</b>	<b>5.97</b>	<b>6.73</b>	<b>6.95</b>	<b>6.70</b>	<b>6.33</b>
a. Perdagangan Besar dan Eceran	5.31	6.08	6.81	6.96	6.69	6.37
b. Hotel	6.28	2.27	5.95	6.37	7.72	5.72
c. Restoran	4.18	3.31	3.86	6.84	7.00	5.04
<b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	<b>8.03</b>	<b>9.81</b>	<b>10.27</b>	<b>9.33</b>	<b>8.61</b>	<b>9.21</b>
a. Angkutan	6.41	6.64	7.36	6.54	6.02	6.59
b. Komunikasi	16.19	24.42	21.75	19.01	16.69	19.61
<b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN, &amp; JASA PERUSAHAAN</b>	<b>6.35</b>	<b>6.33</b>	<b>7.87</b>	<b>7.17</b>	<b>6.99</b>	<b>6.94</b>
a. Bank	5.30	3.21	6.94	8.38	7.03	6.17
b. Lembaga keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunjang	11.04	9.34	9.17	5.66	6.75	8.39
c. Sewa Bangunan	4.69	7.27	7.92	7.17	7.18	6.85
d. Jasa Perusahaan	5.09	8.10	7.58	5.47	5.83	6.41
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>3.67</b>	<b>4.21</b>	<b>4.85</b>	<b>6.02</b>	<b>6.55</b>	<b>5.06</b>
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	2.35	2.67	3.23	5.23	6.01	3.90
b. Swasta	6.68	7.57	8.23	7.59	7.60	7.53
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>5.60</b>	<b>6.30</b>	<b>6.49</b>	<b>6.37</b>	<b>6.13</b>	<b>6.18</b>

*Sumber: BPS. PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 (data diolah)*

#### **4.3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita**

Salah satu informasi yang dijadikan indikator bagi keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Regional Bruto (PDRB) Perkapita. Dengan tersedianya data tersebut, secara tidak langsung dapat dilihat gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita yang dapat dicapai suatu daerah dalam suatu periode sangat tergantung pada tingkat perkembangan penduduk daerah tersebut.

Dalam lima tahun terakhir (2004-2008), berdasarkan atas dasar harga berlaku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh cukup tingginya peningkatan nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan relatif tendahnya pertumbuhan penduduk Sumatera Barat.

Cukup tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dalam lima tahun terakhir (2004-2008) bukanlah suatu hal yang menggembirakan, karena tidak didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat. Angka yang cukup tinggi tersebut lebih disebabkan oleh inflasi yang terjadi di Indonesia, Khususnya Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.



**Tabel 4.9**  
**Perkembangan PDRB Perkapita di**  
**Sumatera Barat (Juataan Rupiah)**  
**Pada Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Atas Harga Berlaku</b>	<b>PDRB Perkapita</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2004	37,358,645.93	8.24	-
2005	44,674,569.25	9.8	18.73
2006	53,029,588.11	11.45	17.01
2007	59,799,045.30	12.73	11.19
2008	70,614,210.04	14.83	16.47

*Sumber: BPS, PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 data dilah)*

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan PDRB perkapita Sumatera Barat pada tahun 2005 adalah 18.73 persen. Dan mengalami penurunan tingkat pertumbuhan sampai tahun 2008 menjadi 16.47 persen. Hal ini karena tingkat persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku dan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun 2005-2008 juga mengalami penurunan.

#### **4.4 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor**

Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat No 4 tahun 2003, tentang pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.



Tabel di bawah ini akan memperlihatkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat.

**Tabel 4.10**  
**Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor**  
**di Sumatera Barat Pada Tahun 1979-2008**  
**(Dalam Unit)**

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Pertumbuhan (%)
1	1979	63,473	-
2	1980	78,701	23.99
3	1981	92,434	17.45
4	1982	109,183	18.12
5	1983	123,988	13.56
6	1984	133,542	7.71
7	1985	140,767	5.41
8	1986	150,516	6.93
9	1987	158,788	5.50
10	1988	137,094	-13.66
11	1989	142,804	4.17
12	1990	149,862	4.94
13	1991	157,127	4.85
14	1992	166,949	6.25
15	1993	175,745	5.27
16	1994	186,634	6.20
17	1995	204,084	9.35
18	1996	224,238	9.88
19	1997	251,560	12.18
20	1998	267,196	6.22
21	1999	283,262	6.01
22	2000	308,748	9.00
23	2001	343,169	11.15
24	2002	377,927	10.13
25	2003	417,299	10.42
26	2004	520,758	24.79
27	2005	682,450	31.05
28	2006	842,092	23.39
29	2007	1,134,125	34.68
30	2008	1,426,158	25.75
<b>Rata-Rata</b>			<b>11.75</b>

*Sumber: BPS, Statistik Indonesia Berbagai Edisi (data diolah)*

Dari tabel di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 1988 terjadi penurunan pertumbuhan kendaraan bermotor hingga mencapai -13,66 persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1988 tersebut, jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan mengalami penurunan, baik jenis mobil penumpang, bis, mobil gerobak (truk) maupun sepeda motor. Dan tahun berikutnya 1989 kendaraan bermotor mengalami peningkatan hingga 2008 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 25,75 persen.

Sementara itu, Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor di Sumatera Barat yang paling tinggi terjadi pada tahun 2007 yang mencapai 34,68 persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2007 tersebut terjadi peningkatan yang signifikan pada seluruh jenis kendaraan bermotor. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada jenis truk dengan tingkat pertumbuhan yang mencapai 64,00 persen. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor disebabkan oleh faktor kemajuan teknologi, cara untuk memiliki kendaraan yang sudah banyak memiliki kemudahan dan adanya keinginan sebagian masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor yang lebih banyak dan sebagainya.

## BAB V

### TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

#### 5.1 TEMUAN EMPIRIS

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan terhadap hasil pengolahan data empiris yang ditujukan untuk membuktikan hipotesis yang penulis ajukan yaitu untuk membuktikan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat (1979-2008) yang diolah dengan bantuan program SPSS.

Dengan menggunakan variabel-variabel yang ikut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat maka dipakai data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.

##### 5.1.1 Uji Regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS dapat dilihat gambaran hasil secara keseluruhan dari proses pengolahan data. Dari output perhitungan program SPSS dapat dibentuk suatu persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$\text{Log } Y_t = -2,14 + 0,63 \text{ Log}(X_1) + 0,86 \text{ Log}(X_2)$$

(6,85)                      (4,75)

$$R^2 = 0,979$$

$$F_{\text{hit}} = 616,41$$

Dari hasil estimasi diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,979. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel-variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),



dan jumlah kendaraan bermotor yang ada dalam model tersebut dapat menjelaskan sebanyak 97,90 persen terhadap variasi variabel tergantung yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sisanya sebesar 2,10 persen variasi dalam variabel tergantung dijelaskan oleh variasi variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan pengaruh yang positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi sebesar 0,63. Artinya apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) naik 1 persen maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar 0,63 persen. Temuan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kuncoro (2001) dan temuan Santosa (2005) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri". Kedua peneliti tersebut menyimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada suatu daerah.

Sementara itu, variabel jumlah kendaraan bermotor juga berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi sebesar 0,86. Artinya apabila jumlah kendaraan bermotor (JKB) naik 1 persen maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar 0,86 persen.

Dari kedua variabel independen diatas yang sangat berpengaruh terhadap variabel dependen adalah variabel jumlah kendaraan bermotor dengan nilai 0,86

dan yang kedua dipengaruhi oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan nilai 0,63.

Selanjutnya, untuk membuktikan tingkat keberartian setiap variabel bebas harus diuji dengan t-test yaitu dengan membandingkan hasil t-hitung dengan t-tabel yang ada. Apabila terbukti nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel maka dapat disimpulkan bahwa memang setiap variabel independen berarti nyata pengaruhnya terhadap variabel dependen dan apabila nilainya lebih kecil maka nilai tersebut dapat diabaikan.

Hasil hipotesis t-test yang diperoleh melalui hasil perhitungan didapat nilai t-hitung untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 6,85 sedangkan nilai t-tabel dengan tingkat kesalahan sebesar 5% dan  $df = 29$  adalah 1,69 berarti  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $6,85 > 1,69$ ). Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti berarti nyata mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jumlah Kendaraan mempunyai nilai t-hitung sebesar 4,75 sedangkan nilai t-tabel dengan tingkat kesalahan 5% dan  $df = 29$  adalah sebesar 1,69 berarti  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $4,75 > 1,69$ ). Hasil ini membuktikan bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari pengujian yang dilakukan tersebut dari kedua variabel independen tersebut yaitu variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan jumlah kendaraan bermotor. Kedua variabel bebas tersebut memiliki dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat.

Uji hipotesis dengan uji F dapat memperlihatkan pengaruh bersama-sama variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya. Variabel



independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen jika nilai  $F\text{-test} > F\text{-tabel}$  dan variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen jika nilai  $F\text{-test} < F\text{-tabel}$ .

Dari hasil regresi didapatkan nilai  $F\text{-test}$  sebesar 616,41 sedangkan  $F\text{-tabel}$  dihitung dengan cara  $df_1 = k-1$ , dan  $df_2 = n-k$ , dimana  $k$  adalah jumlah variabel dependen dan variabel independen, dan  $n$  adalah jumlah data sehingga didapatkan nilai  $F\text{-tabel}$  (2 : 27) sebesar 3,35. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $F\text{-test} > F\text{-tabel}$  ( $616,41 > 3,35$ ). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Produk domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor secara bersama-sama mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat.

### 5.1.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Tabel 5.1 menunjukkan hasil analisis multikolinearitas.

**Tabel 5.1**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.146	.417		-5.148	.000		
	PBRD	.635	.093	.592	6.852	.000	.106	9.406
	Jumlah kendaraan Bermotor	.861	.181	.410	4.751	.000	.106	9.406

a. Dependent Variable: PAD

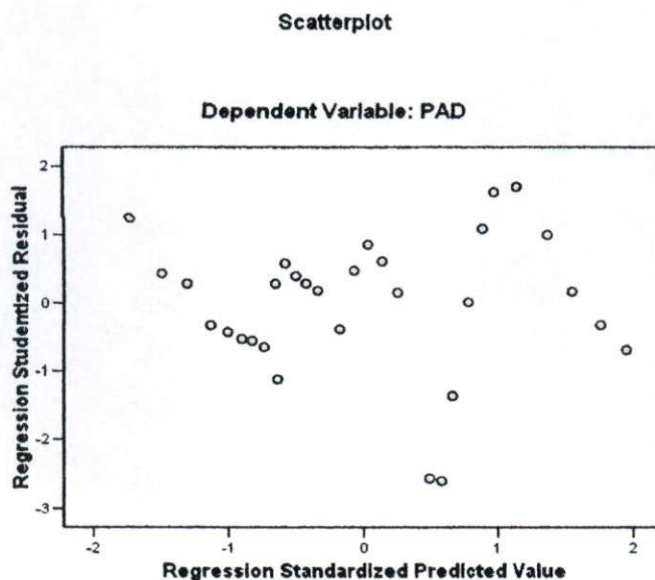


Dari hasil perhitungan *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independent yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil analisis uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam grafik 5.1.

**Grafik 5.1**  
**Analisis Uji Heteroskedastisitas**



Dari grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu ( $e_t$ ) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya ( $e_{t-1}$ ). Tabel 5.2 menunjukkan hasil analisis uji autokorelasi.

**Tabel 5.2**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary(b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.989(a)	.979	.977	.10529867	.626

a Predictors: (Constant), Jumlah Kendaraan Bermotor, PDRB

b Dependent Variable: PAD

Angka Durbin Watson menunjukkan 0,626, yang berarti terletak di bawah angka batas bawah ( $du$ ) dengan jumlah variabel independen ( $k$ )= 2 yaitu 1,28. Hal ini dapat disimpulkan ada gejala autokorelasi positif dari model.

## 5.2 IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Hal ini karena hakekat dari otonomi daerah itu sendiri adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan (Adi, 2007). Oleh karena itu, suatu daerah lebih mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran daerah tersebut. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Daerah (PAD) dalam anggaran tersebut, maka daerah tersebut dinilai semakin mandiri dan dianggap telah mampu menjalankan otonomi daerah.

Pada penelitian ini yang mencoba melihat dan menganalisis hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat, didapat hubungan yang positif dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel jumlah kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diantara kedua variabel tersebut, variabel jumlah kendaraan bermotor lebih besar mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat dari pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan temuan empiris tersebut, ada beberapa implikasi kebijakan yang dapat diambil. Pertama, implikasi kebijakan yang berkaitan dengan Produk



Domestik Regional Bruto (PDRB). Kedua, implikasi kebijakan yang berkaitan dengan jumlah kendaraan bermotor.

Mengenai implikasi kebijakan yang berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pemerintah daerah perlu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di masa yang akan datang. Tujuannya adalah agar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat. Santosa (2005) mengungkapkan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan melalui peningkatan sektor-sektor dominan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika dikaitkan dengan sektor-sektor dominan ekonomi Sumatera Barat, maka perlu peningkatan pada sektor pertanian, sektor perdagangan hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa.

Selain itu, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan melalui pelayanan terhadap investasi. Kondisi investasi Sumatera Barat yang belum begitu kondusif, seperti masih panjangnya birokrasi perizinan. Walaupun otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah, namun demikian perizinan penanaman modal masih banyak berada di tangan pemerintah pusat. Sementara itu, biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh investor dalam pengurusan izin masih dirasakan cukup tinggi. Semua hal ini menyebabkan timbulnya ekonomi biaya tinggi yang sangat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan terhadap investasi guna meningkatkan PDRB, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya, alokasi anggaran yang memadai terhadap sarana dan prasarana pelayanan publik juga perlu dalam rangka peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Saragih (2003) bahwa perlu meningkatkan sarana dan prasarana publik guna meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto sehingga lebih berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, implikasi kebijakan yang berkaitan dengan jumlah kendaraan bermotor, pemerintah daerah terutama pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu melakukan identifikasi/pendataan terhadap jumlah kendaraan bermotor, penyempurnaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Identifikasi/pendataan terhadap jumlah kendaraan bermotor diperlukan untuk mengetahui jumlah kendaraan bermotor yang akan membayar pajak, sehingga diketahui jumlah wajib pajak kendaraan bermotor tersebut. Dalam hal ini Thesaurianto (2007) mengungkapkan perlunya membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor khususnya kendaraan bekas, sehingga semua kendaraan terdaftar dengan baik dan masyarakat bergairah untuk memiliki kendaraan bermotor yang harganya terjangkau walaupun bekas, sehingga dengan meningkatnya kendaraan bermotor akan berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat, dan dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat.

Devas (1989) mengungkapkan pajak daerah memiliki masalah pada sistem pajak daerah itu sendiri. Oleh karena itu penyempurnaan sistem pajak daerah

khususnya sistem pembayaran pajak bermotor perlu dilakukan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat.

Selanjutnya, peningkatan kesadaran wajib pajak dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh dinas pengelola pendapatan yang ada di Sumatera Barat.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Bersadarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat (1979-2008) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perkembangan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat dari tahun 1979-2008 cenderung berfluktuasi setiap tahunnya.
2. Dari hasil pengujian secara keseluruhan (uji-f), nilai f-hitung adalah 616,41 lebih besar dari f-tabel sebesar 3.35. Artinya semua variabel independen (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan bermotor) secara keseluruhan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel independen (Pendapatan Asli Daerah (PAD)).
3. Koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,979 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 97,90 persen dan sisanya 2,10 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan  $\alpha = 0,05$ , menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dimana nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu  $6,85 > 1,69$ , berarti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat.

5. Jumlah kendaraan bermotor dengan  $\alpha = 0,05$  menunjukkan hubungan positif dan signifikan, dimana nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu  $4,75 > 1,69$ . Artinya jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat.
6. Dari kedua variabel independen (PDRB dan jumlah Kendaraan bermotor) yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang paling besar pengaruhnya adalah variabel jumlah kendaraan bermotor dan kemudian baru diikuti oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

## 6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan.

1. Pemda perlu mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di masa yang akan datang sehingga pengaruhnya lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan melalui pelayanan terhadap investasi serta alokasi anggaran yang memadai terhadap sektor ekonomi yang potensial.

2. Pemda terutama pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu melakukan identifikasi/pendataan terhadap jumlah kendaraan bermotor, penyempurnaan sistem pembayaran pajak bermotor, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Adi, Priyo Hari. 2007. "Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa – Bali". Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Badan Pusat Statistik, Sumbar, Sumatera Dalam Angka, Berbagai Tahun Terbitan.
- Badan Pusat Statistik, Sumbar, PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha, Berbagai Tahun Terbitan.
- Badan Pusat Statistik, Sumbar, Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berbagai Tahun Terbitan.
- Badan Pusat Statistik, Sumbar, Tinjauan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 1998.
- Berti, Emelia. 2006. "Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur". Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi (Tantangan dan Hambatan)*. Kemitraan untuk Tata Pemerintah yang Baik: Jakarta.
- Davey, KJ. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansi Bagi Dunia Ketiga*. Universitas Indonesia (UI: Press).
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, dan Roy Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI: Press).
- Gujarati, Damodar dan Sumarno Zain. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Harianto David dan Priyo Hari Adi. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita". Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana : Salatiga.
- Ismail, Manawar. 2001. "Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah"; Telaah Ekonomi, Manajemen, Akuntansi (TEMA). Vol II, No.1, ISSN 1411-8149.

- Iswandono. 1992. *Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) :Yogyakarta.
- Kaho, Josep Riwu. 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Bina Aksara: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif (Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi)* Edisi Pertama, Unit Penerbit dan Pecertakan (UPP) STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Landiyanto, Erlangga Agustino.2005. "Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan kota di Era Otonomi: Studi Kasus Kota Surabaya" . Surabaya: Universitas Airlangga.
- Nugroho, Bhono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. ANDI Yogyakarta: Yogyakarta.
- Santosa, Purbayu Budi dan Retno Puji Rahayu. 2005. "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri". Vol 2 No 1.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. PT Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makroekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Suparmoko.2002. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Balai Pustaka Fakultas Ekonomi (BFFE) Universitas Gajah Mada (UGM): Yogyakarta.
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007. "Analisis pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah". Semarang: Universitas Diponegoro.
- Yasin, Moh. 2004. *Dasar-Dasar Demografi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.



Lampiran 1

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU  
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1979-2008 (DALAM JUTAAN)**

No	Lapangan Usaha	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
1	Pertanian	181.057,10	223.056,48	281.575,21	341.884,55	370.147,67	437.755,78	507.980,00
2	Pertambangan & Penggalian	3.231,55	5.406,37	7.241,31	10.787,77	10.260,19	16.802,31	22.955,14
3	Industri & Pengolahan	49.180,36	71.863,24	93.171,62	117.383,92	123.936,03	137.609,63	162.874,13
4	Listrik dan Air Minum	848,15	1.537,81	2.693,74	3.875,10	11.010,21	16.834,10	19.230,95
5	Bangunan	18.426,31	44.306,88	48.487,10	68.859,26	80.267,35	84.497,67	82.116,71
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	117.195,65	170.818,08	233.480,42	288.500,02	268.392,01	310.589,67	337.975,41
7	Pengangkutan & Komunikasi	37.727,23	49.175,24	55.760,24	76.891,08	130.411,25	154.098,75	171.355,91
8	Bank dan lembaga Keuangan Lainnya	4.534,41	6.752,49	12.379,10	18.039,23	26.150,71	29.653,20	39.164,39
9	Sewa Rumah	16.927,12	24.660,32	30.228,28	32.974,80	46.334,85	51.503,10	53.658,39
10	Pemerintah dan Pertahanan	45.913,83	59.466,95	81.586,41	89.868,95	115.251,08	143.805,73	154.622,97
11	Jasa-Jasa	11.176,06	13.723,79	15.940,86	17.619,73	52.093,44	58.611,98	63.855,17
	<b>Total</b>	<b>498.217,77</b>	<b>670.767,65</b>	<b>862.544,29</b>	<b>1.066.683,41</b>	<b>1.234.254,79</b>	<b>1.441.761,92</b>	<b>1.615.789,17</b>

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 1979-1985



**LANJUTAN**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU  
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1979-2008 (DALAM JUTAAN)**

<b>No</b>	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>1986</b>	<b>1987</b>	<b>1988</b>	<b>1989</b>	<b>1990</b>	<b>1991</b>	<b>1992</b>
1	Pertanian	613.358,30	748.504,62	872.580,74	980.054,59	1.053.995,82	1.162.503,59	1.268.814,73
2	Pertambangan & Penggalian	23.137,79	24.133,21	32.592,54	43.142,32	48.294,16	50.652,66	64.117,62
3	Industri & Pengolahan	184.137,85	218.400,27	265.344,78	319.639,97	400.247,73	460.346,98	560.158,91
4	Listrik, dan Air Minum	22.591,19	26.717,63	31.305,71	37.745,72	41.711,38	45.484,71	49.626,87
5	Bangunan	72.552,70	86.161,67	97.830,22	110.096,48	129.437,57	145.115,27	160.777,53
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	399.850,21	518.959,68	608.763,76	707.059,62	792.129,72	898.119,52	1.033.025,54
7	Pengangkutan & Komunikasi	185.239,85	203.936,44	226.650,42	244.782,74	304.669,99	362.248,35	428.915,76
8	Bank dan lembaga Keuangan Lainnya	44.222,46	49.548,51	66.312,23	76.252,90	90.270,44	105.953,57	117.386,93
9	Sewa Rumah	55.866,88	60.739,51	65.025,94	67.894,74	73.295,39	77.763,77	81.971,04
10	Pemerintah dan Pertahanan	178.330,88	196.023,03	215.898,85	241.352,20	274.697,28	322.854,32	38.525,63
11	Jasa-Jasa	67.965,38	72.239,91	78.930,51	85.293,48	93.754,90	102.052,08	117.294,12
	<b>Total</b>	<b>1.847.253,49</b>	<b>2.205.364,48</b>	<b>2.561.232,70</b>	<b>2.913.314,76</b>	<b>3.302.504,38</b>	<b>3.733.094,82</b>	<b>4.273.614,68</b>

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 1986-1992

**LANJUTAN**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU  
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1979-2008 (DALAM JUTAAN)**

No	Lapangan Usaha	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Pertanian	1.313.094,05	1.545.037,21	1.717.650,04	1.995.842,88	2.172.398,34	3.826.250,13	4.816.941,78	5.098.861,93
2	Pertambangan & Penggalian	319.356,04	423.900,79	516.408,40	603.938,76	734.070,89	807.242,28	752.036,39	800.028,60
3	Industri & Pengolahan	887.092,16	1.050.455,17	1.263.131,74	1.461.955,27	1.611.699,02	2.423.811,23	2.645.644,20	3.060.445,92
4	Listrik, Gas dan Air Minum	54.815,54	69.752,84	89.906,66	113.833,87	152.585,33	196.124,82	239.923,38	295.859,90
5	Bangunan	370.742,40	448.426,39	537.686,84	680.500,77	795.710,65	863.711,57	903.635,63	1.027.377,38
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.028.137,87	1.265.790,98	1.404.895,07	1.542.190,26	1.735.628,78	3.343.170,85	3.674.185,90	4.043.962,22
7	Pengangkutan & Komunikasi	684.790,60	803.521,68	946.810,35	1.119.183,68	1.270.555,45	2.311.295,35	2.749.394,52	3.020.019,23
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	370.002,97	422.934,43	457.157,36	492.213,59	543.124,42	929.262,82	1.004.082,56	1.074.406,50
9	Jasa-Jasa	999.020,74	1.188.101,55	1.333.477,01	1.505.167,98	1.728.964,40	2.941.870,76	3.728.810,67	4.041.486,63
	<b>Total</b>	<b>6.027.052,82</b>	<b>7.217.921,04</b>	<b>8.267.123,47</b>	<b>9.514.827,06</b>	<b>10.744.737,28</b>	<b>17.642.740,01</b>	<b>20.514.655,03</b>	<b>22.462.448,31</b>

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2000



**LANJUTAN**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU  
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1979-2008 (DALAM JUTAAN)**

No	Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian	6.169.340,45	6.998.194,57	8.012.509,54	9.066.534,50	11.433.001,38	13.396.523,71	14.754.867,69	17.272.739,30
2	Pertambangan & Penggalian	976.429,98	1.115.590,55	1.188.626,36	1.315.145,21	1.514.207,22	1.829.475,26	2.059.937,26	2.351.407,34
3	Industri & Pengolahan	3.583.194,45	3.935.454,44	4.172.362,06	4.575.623,92	5.084.342,79	6.055.971,48	7.179.242,77	8.553.816,92
4	Listrik, Gas dan Air Minum	259.945,04	380.350,04	487.217,42	549.321,62	666.706,05	754.790,19	822.189,05	863.207,12
5	Bangunan	1.300.136,83	1.436.900,54	1.636.974,38	2.006.972,31	2.472.641,03	2.972.397,17	3.290.146,38	3.904.656,99
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	4.981.281,18	5.645.470,30	6.226.084,69	7.022.554,87	7.799.756,56	8.992.233,41	10.367.999,17	12.529.351,36
7	Pengangkutan & Komunikasi	3.081.988,46	3.821.651,56	4.172.436,93	4.587.877,31	6.167.342,76	8.022.487,00	9.009.321,18	10.603.054,63
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.337.504,31	1.539.678,31	1.745.187,41	1.931.357,87	2.249.279,97	2.632.088,73	2.963.365,97	3.462.672,60
9	Jasa-Jasa	4.464.314,11	5.025.839,50	5.489.284,16	6.303.258,32	7.287.291,49	8.373.621,16	9.351.975,83	11.073.303,78
	<b>Total</b>	<b>26.154.134,82</b>	<b>29.899.129,81</b>	<b>33.130.682,95</b>	<b>37.358.645,93</b>	<b>44.674.569,24</b>	<b>53.029.588,10</b>	<b>59.799.045,30</b>	<b>70.614.210,04</b>

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 1979-2008



**Lampiran 2**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS HARGA DASAR KONSTAN 1975 SUMATERA BARAT  
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1978-1983 (DALAM JUTAAN)**

No	Lapangan Usaha	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1	Pertanian	98.779,16	104.996,79	118.541,38	121.362,19	132.547,56	140.113,74
2	Pertambangan & Penggalian	1.176,33	1.364,79	1.800,13	2.286,62	2.816,12	3.199,63
3	Industri & Pengolahan	25.245,41	27.943,04	33.661,45	39.678,31	43.475,54	44.903,39
4	Listrik, Gas dan Air Minum	385,63	445,51	604,14	826,43	920,65	1.022,42
5	Bangunan	14.736,26	18.786,21	23.632,85	25.310,38	30.888,28	34.117,29
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	58.213,87	59.199,74	77.047,88	88.506,05	101.134,99	121.944,17
7	Pengangkutan & Komunikasi	21.184,16	23.192,24	24.020,18	24.927,34	25.381,73	26.518,39
8	Bank dan lembaga Keuangan Lainnya	1.947,84	2.347,25	2.658,21	4.428,70	5.982,76	6.290,24
9	Sewa Rumah	6.793,50	6.943,64	7.096,97	7.253,48	7.402,35	7.812,86
10	Pemerintah dan Pertahanan	24.390,88	24.172,81	26.528,79	32.156,08	32.773,77	33.833,25
11	Jasa-Jasa	6.496,00	6.926,00	7.139,23	7.532,89	7.739,91	8.103,47
	<b>Total</b>	<b>259.349,04</b>	<b>276.318,62</b>	<b>322.731,21</b>	<b>354.268,47</b>	<b>391.063,66</b>	<b>427.858,85</b>

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 1978-1983

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983 SUMATERA BARAT  
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1983-1993 (DALAM JUTAAN)**

No	Lapangan Usaha	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
1	Pertanian	370.147,67	396.968,57	424.279,22	450.404,46	478.256,92	495.443,91	516.094,41	542.705,37	567.371,24	596.488,62	631.404,57
2	Pertambangan & Penggalian	10.260,19	15.485,22	19.402,01	17.986,50	16.713,78	20.751,92	24.843,84	28.316,13	25.562,25	29.157,30	30.168,82
3	Industri & Pengolahan	123.936,03	129.095,24	135.997,71	144.599,73	152.183,67	164.176,85	184.150,52	213.412,51	232.918,36	254.421,38	277.564,20
4	Listrik, Gas dan Air Minum	11.010,21	15.108,93	16.035,23	17.542,29	20.325,64	22.573,66	24.847,91	26.618,66	27.976,19	28.821,04	30.754,15
5	Bangunan	80.267,35	74.493,23	66.826,75	58.144,49	57.552,38	61.293,28	66.563,77	71.512,57	73.872,57	78.654,44	82.942,36
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	268.392,01	281.779,77	285.035,17	304.267,58	330.067,27	358.620,92	394.408,40	427.415,58	463.378,77	495.874,12	529.513,57
7	Pengangkutan & Komunikasi	130.411,25	140.783,60	150.559,34	158.322,39	165.529,18	179.619,11	189.188,30	195.169,11	203.685,89	213.351,22	288.310,04
8	Bank dan lembaga Keuangan Lainnya	26.150,71	27.128,44	33.061,90	33.653,41	35.128,76	43.304,89	47.532,27	51.085,79	55.581,52	57.795,35	61.931,81
9	Sewa Rumah	46.334,85	47.109,54	47.604,19	49.079,92	50.223,30	52.439,18	54.048,36	55.806,27	58.740,49	61.213,54	63.051,03
10	Pemerintah dan Pertahanan	115.251,08	118.731,86	120.679,18	131.716,47	132.620,10	137.372,53	146.416,04	156.123,35	170.299,78	191.627,93	212.438,93
11	Jasa-Jasa	52.093,44	53.583,01	56.145,54	58.188,57	50.223,30	61.243,27	63.873,36	66.235,10	68.740,94	71.138,97	74.152,61
	<b>Total</b>	<b>1.234.254,79</b>	<b>1.300.267,41</b>	<b>1.355.626,24</b>	<b>1.423.905,81</b>	<b>1.498.318,22</b>	<b>1.596.839,52</b>	<b>1.712.067,18</b>	<b>1.832.399,46</b>	<b>1.948.122,00</b>	<b>2.078.543,88</b>	<b>2.222.301,80</b>

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 1983-1993



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 SUMATERA BARAT  
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1993-2000**

No	Lapangan Usaha	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Pertanian	1.313.094,50	1.373.559,62	1.482.442,23	1.586.124,30	1.609.290,49	1.586.070,49	1.636.619,21	1.645.577,41
2	Pertambangan & Penggalian	319.356,04	398.914,14	475.231,35	504.670,28	555.799,14	496.674,65	447.383,93	449.251,08
3	Industri & Pengolahan	887.092,16	978.413,26	1.098.600,54	1.228.040,00	1.304.732,10	1.184.425,51	1.208.091,83	1.291.039,73
4	Listrik, Gas dan Air Minum	54.815,54	64.155,57	80.954,77	100.939,33	132.851,33	145.110,03	166.324,92	190.982,63
5	Bangunan	370.742,40	389.551,17	425.351,51	468.111,57	487.580,37	314.781,89	292.628,12	304.227,83
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.028.137,87	1.105.078,68	1.176.547,07	1.262.379,81	1.305.522,68	1.239.635,98	1.262.265,59	1.313.489,29
7	Pengangkutan & Komunikasi	684.790,60	737.457,93	821.520,65	889.238,94	977.963,56	897.258,58	943.518,88	995.328,03
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	37.000.297,00	395.054,09	407.941,79	421.012,88	430.889,41	399.340,23	365.190,70	381.238,64
9	Jasa-Jasa	999.020,74	1.033.671,38	1.085.608,27	1.149.027,98	1.196.033,44	1.217.794,28	1.255.012,85	1.297.102,98
	<b>Total</b>	<b>6.027.052,82</b>	<b>6.475.855,84</b>	<b>7.054.198,18</b>	<b>7.609.545,09</b>	<b>8.000.662,52</b>	<b>7.481.091,64</b>	<b>7.577.036,03</b>	<b>7.868.237,62</b>

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2000



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 SUMATERA BARAT  
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000-2008**

No	Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian	5.385.595,71	5.648.004,31	6.091.915,61	6.557.510,72	6.937.172,92	7.293.205,65	7.658.394,83	8.038.919,12	8.437.318,94
2	Pertambangan & Penggalian	873.887,57	868.572,82	884.878,74	894.245,03	923.379,06	951.882,62	980.826,77	1.028.828,26	1.081.278,74
3	Industri & Pengolahan	3.218.470,01	3.318.632,53	3.404.309,81	3.472.186,00	3.629.455,72	3.808.287,01	3.978.641,07	4.209.069,40	4.464.272,82
4	Listrik, Gas dan Air Minum	210.962,36	243.639,82	271.084,90	284.293,97	301.070,70	338.722,91	368.981,69	394.432,98	407.582,48
5	Bangunan	1.131.101,81	1.157.117,15	1.194.839,17	1.278.358,43	1.375.769,34	1.440.337,58	1.554.889,64	1.627.195,26	1.739.217,10
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	4.147.024,46	4.332.173,03	4.543.977,61	4.755.166,34	5.006.640,26	5.305.757,21	5.662.879,36	6.056.682,55	6.462.695,03
7	Pengangkutan & Komunikasi	2.650.332,56	2.749.038,34	2.928.943,45	3.165.005,33	3.419.244,73	3.754.819,81	4.140.569,92	4.526.737,30	4.916.482,80
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.164.508,32	1.204.302,67	1.230.509,41	1.294.725,54	1.376.937,68	1.464.102,75	1.579.347,52	1.692.546,42	1.810.785,14
9	Jasa-Jasa	4.107.731,25	4.205.893,26	4.289.729,05	4.445.290,27	4.608.466,14	4.802.364,99	5.035.414,31	5.338.557,30	5.688.288,51
	<b>Total</b>	<b>22.889.614,05</b>	<b>23.727.373,93</b>	<b>24.840.187,76</b>	<b>26.146.781,63</b>	<b>27.578.136,56</b>	<b>29.159.480,53</b>	<b>30.949.945,10</b>	<b>32.912.968,59</b>	<b>35.007.921,57</b>

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2000-2008

**Lampiran 3**

**JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR SUMATERA BARAT  
MENURUT JENIS KENDARAAN TAHUN 1979-2008 (DALAM UNIT)**

No	Tahun	Jenis kendaraan				Jumlah
		Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	
1	1979	7.231	2.934	8.948	44.360	63.473
2	1980	8.456	3.583	10.822	55.841	78.701
3	1981	9.357	4.145	13.208	65.724	92.434
4	1982	10.703	4.812	15.181	70.487	109.183
5	1983	12.030	5.320	16.966	89.672	123.988
6	1984	13.083	5.735	18.727	95.997	133.542
7	1985	14.174	6.148	20.124	100.321	140.767
8	1986	15.776	6.794	21.417	106.529	150.516
9	1987	17.285	7.701	23.209	110.593	158.788
10	1988	11.694	9.097	21.557	94.746	137.094
11	1989	12.128	10.121	22.471	98.084	142.804
12	1990	12.872	11.442	23.769	101.779	149.862
13	1991	14.075	12.655	25.292	105.105	157.127
14	1992	14.784	13.884	26.514	111.767	166.949
15	1993	15.627	15.248	27.782	117.088	175.745
16	1994	16.796	17.550	29.082	123.529	186.634
17	1995	18.338	20.108	31.984	133.674	204.084
18	1996	20.187	23.361	34.696	145.994	224.238
19	1997	21.344	26.297	37.148	166.771	251.560
20	1998	22.046	28.075	38.076	178.999	267.196
21	1999	22.834	30.575	39.608	190.245	283.262
22	2000	24.120	34.118	42.107	208.403	308.748
23	2001	25.229	38.323	45.109	234.508	343.169
24	2002	26.519	42.905	48.140	260.363	377.927
25	2003	27.857	48.035	52.340	289.067	417.299
26	2004	33.354	61.518	59.441	366.445	520.758
27	2005	35.765	69.245	75.520	501.920	682.450
28	2006	39.975	73.116	75.520	653.487	842.098
29	2007	44.689	77.809	123.645	887.982	1.134.125
30	2008	49.403	82.502	149.755	1.144.498	1.426.158

Sumber: BPS, Statistik Indonesia Tahun 1979-2008



## Data Regresi

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	LOG PAD	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	LOG PDRB ADH Berlaku	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)	LOG Jumlah Kendaraan Bermotor
1	1979	3,507,180,000	9.54496	498,217,770,000	11.69742	63,473	4.80259
2	1980	4,251,333,000	9.62853	670,767,650,000	11.82657	78,701	4.89598
3	1981	5,537,865,000	9.74334	862,544,290,000	11.93578	92,434	4.96583
4	1982	6,354,378,000	9.80307	1,066,683,410,000	12.02804	109,183	5.03816
5	1983	7,601,315,000	9.88089	1,234,254,790,000	12.09140	123,988	5.09338
6	1984	8,737,608,000	9.94139	1,441,761,920,000	12.15889	133,542	5.12562
7	1985	9,762,018,000	9.98954	1,615,789,170,000	12.20838	140,767	5.14850
8	1986	11,022,542,000	10.04228	1,847,253,490,000	12.26653	150,516	5.17758
9	1987	11,559,990,000	10.06296	2,205,364,480,000	12.34348	158,788	5.20082
10	1988	15,554,592,000	10.19186	2,561,235,700,000	12.40845	137,094	5.13702
11	1989	18,777,162,000	10.27363	2,913,314,760,000	12.46439	142,804	5.15474
12	1990	20,281,370,000	10.30710	3,302,504,380,000	12.51884	149,862	5.17569
13	1991	22,249,859,000	10.34733	3,733,094,820,000	12.57207	157,127	5.19625
14	1992	24,920,998,000	10.39657	4,273,614,680,000	12.63080	166,949	5.22258
15	1993	28,336,974,000	10.45235	6,027,052,820,000	12.78010	175,745	5.24488
16	1994	41,005,009,000	10.61284	7,217,921,050,000	12.85841	186,634	5.27099
17	1995	52,790,535,000	10.72256	8,267,123,470,000	12.91735	204,084	5.30981
18	1996	59,123,677,000	10.77176	9,514,827,060,000	12.97840	224,238	5.35071
19	1997	63,315,546,000	10.80151	10,744,737,280,000	13.03120	251,560	5.40064
20	1998	49,043,849,000	10.69058	17,714,366,690,000	13.24833	267,196	5.42683
21	1999	56,321,020,000	10.75067	20,514,655,030,000	13.31206	283,262	5.45219
22	2000	85,157,383,000	10.93022	22,462,448,310,000	13.35146	308,748	5.48960
23	2001	140,763,201,000	11.14849	26,154,134,820,000	13.41754	343,169	5.53551
24	2002	213,275,546,000	11.32894	29,889,129,810,000	13.47551	377,927	5.57741
25	2003	281,449,460,000	11.44940	33,130,682,950,000	13.52023	417,299	5.62045
26	2004	375,074,888,000	11.57412	37,358,645,920,000	13.57239	520,758	5.71664
27	2005	448,279,018,000	11.65155	44,674,569,240,000	13.65006	682,450	5.83407
28	2006	494,929,542,000	11.69454	53,029,588,100,000	13.72452	842,092	5.92536
29	2007	621,607,519,000	11.79352	59,799,045,300,000	13.77669	1,134,125	6.05466
30	2008	790,087,767,000	11.89768	70,614,210,040,000	13.84889	1,426,158	6.15417



## Lampiran 6

### Hasil Output SPSS **Regression**

#### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	10.61414	.69403404	30
PDRB	12.82047	.64673709	30
Jumlah Kendaraan Bermotor	5.3566218	.33069597	30

#### Correlations

		PAD	PDRB	Jumlah Kendaraan Bermotor
Pearson Correlation	PAD	1.000	.980	.970
	PDRB	.980	1.000	.945
	Jumlah Kendaraan Bermotor	.970	.945	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.000	.000
	PDRB	.000	.	.000
	Jumlah Kendaraan Bermotor	.000	.000	.
N	PAD	30	30	30
	PDRB	30	30	30
	Jumlah Kendaraan Bermotor	30	30	30

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Jumlah Kendaraan Bermotor, PDRB		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.989 <sup>a</sup>	.979	.977	.10529867	.979	616.418	2	27	.000	.626

a. Predictors: (Constant), Jumlah Kendaraan Bermotor, PDRB

b. Dependent Variable: PAD

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.669	2	6.835	616.418	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.299	27	.011		
	Total	13.969	29			

a. Predictors: (Constant), Jumlah Kendaraan Bermotor, PDRB

b. Dependent Variable: PAD



### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.146	.417		-5.148	.000					
	PDRB	.635	.093	.592	6.852	.000	.980	.797	.193	.106	9.406
	Jumlah Kendaraan Bermotor	.861	.181	.410	4.751	.000	.970	.675	.134	.106	9.406

a. Dependent Variable: PAD

### Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	PDRB	Jumlah Kendaraan Bermotor
1	1	2.998	1.000	.00	.00	.00
	2	.002	38.369	.67	.01	.05
	3	.000	138.235	.33	.99	.94

a. Dependent Variable: PAD

Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	9.4232817	11.95464	10.61414	.68655671	30
Std. Predicted Value	-1.735	1.953	.000	1.000	30
Standard Error of Predicted Value	.021	.066	.032	.009	30
Adjusted Predicted Value	9.4038544	11.99079	10.61593	.68982131	30
Residual	-.258147	.17207861	.00000000	.10160282	30
Std. Residual	-2.452	1.634	.000	.965	30
Stud. Residual	-2.603	1.704	-.008	1.019	30
Deleted Residual	-.291070	.18703781	-.001792	.11348118	30
Stud. Deleted Residual	-2.952	1.770	-.027	1.087	30
Mahal. Distance	.240	10.291	1.933	2.047	30
Cook's Distance	.000	.288	.040	.070	30
Centered Leverage Value	.008	.355	.067	.071	30

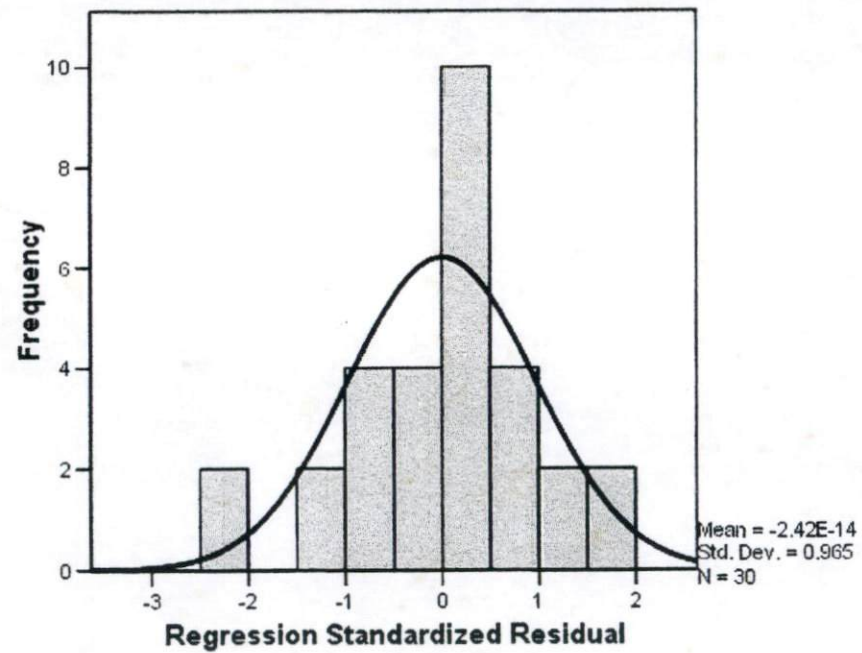
a. Dependent Variable: PAD



## Charts

Histogram

Dependent Variable: PAD



# Scatterplot

Dependent Variable: PAD

